

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



OPTIMALISASI PERAN TNI DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH MENANGANI PANDEMI GUNA KETAHANAN NASIONAL

Oleh:

Mochammad Riza, S.E, M.Tr.Opsla, CRMP
Kolonel Laut (P) NRP. 11353/P

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah menyelesaikan tugas menulis Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul **“Optimalisasi peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi guna ketahanan nasional”**.

Judul Taskap ini berdasarkan Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIII tahun 2022 Lemhanas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA di Lemhannas RI pada tahun 2022, serta ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing / Tutor Taskap kami, yang saya hormati Bapak Dr Djoharis Lubis Msc dan Tim Penguji Taskap, serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam penyusunan Taskap ini hingga dapat selesai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan keterbatasan waktu penulisan, kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya saran masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat bermanfaat kepada pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan dan Keamanan Kesehatan, TNI, BNPB, dan Lembaga serta pihak-pihak terkait lainnya dalam menyiapkan diri dalam

menghadapi pandemi serupa dimasa mendatang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih, Wassalammu'alaikum wr. wb.



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Riza, S.E., M.Tr.Opsla, CRMP.
Pangkat : Kolonel Laut (P) NRP 11353/P
Jabatan : Perwira Staf Ahli C Straops, Koarmada I
Instansi : TNI AL
Alamat : Jalan Sumedi I/B, Komplek TNI AL Kenjeran, Surabaya

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya..



Jakarta, Juli 2022

Penulis

Mochammad Riza, S.E., M.Tr.Opsla, CRMP.
Kolonel Laut (P) NRP 11353/P

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Mochammad Riza, S.E., M.Tr.Opsla, CRMP.

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII

Judul Taskap : Optimalisasi Peran TNI Dalam Mendukung Pemerintah
Menangani Pandemi Guna Ketahanan Nasional.

Taskap tersebut di atas telah ditulis "**sesuai / tidak sesuai**" dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2022, karena itu "**layak / tidak layak**" dan "**disetujui / tidak disetujui**" untuk diuji.

** coret yang tidak diperlukan

Jakarta, Juli 2022

Tutor Taskap


Dr Djoharis Lubis Msc.

LEMBAR PENGESAHAN TASKAP HASIL REVISI/PERBAIKAN.

Nama : Mochammad Riza, S.E., M.Tr.Opsla, CRMP.
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII
Judul Taskap : Optimalisasi Peran TNI Dalam Mendukung Pemerintah
Menangani Pandemi Guna Ketahanan Nasional.

Taskap tersebut di atas telah direvisi/diperbaiki sesuai koreksi dan masukan dari tim penguji Taskap meliputi:

1. .
2. .
3. .
4. .



Mengetahui
Tutor Taskap

Jakarta, Agustus 2022
Ketua Tim Penguji Taskap



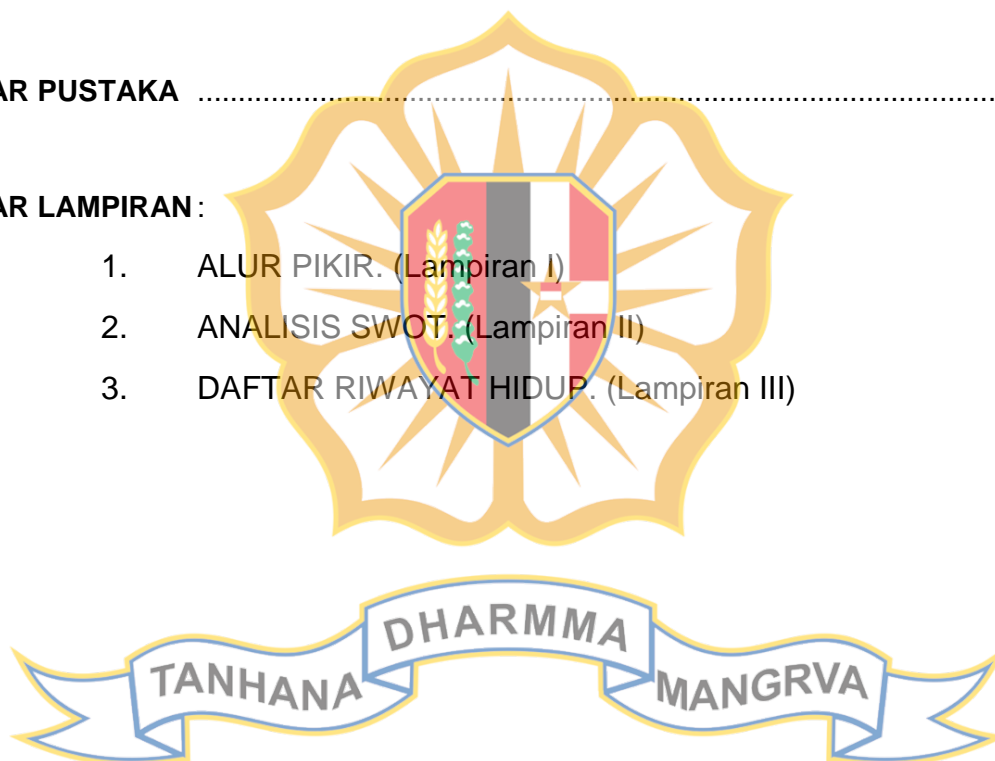
Dr Djoharis Lubis Msc.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
LEMBAR PENGESAHAN TASKAP HASIL REVISI/PERBAIKAN	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	4
5. Metode Pendekatan	5
6. Pengertian	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	7
7. Umum	7
8. Peraturan Perundang-undangan	8
9. Kerangka Teoritis	9
10. Data dan Fakta	12
11. Perkembangan Lingkungan Strategis	19
BAB III	
PEMBAHASAN	22
12. Umum	23

13.	Permasalahan Yang Dihadapi TNI Dalam Mendukung Pemerintah Menangani Pandemi	25
14.	Penyebab Permasalahan TNI Dalam Mendukung Pemerintah Menangani Pandemi	28
15.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	41
16.	Optimalisasi Peran TNI Dalam Mendukung Pemerintah Menangani Pandemi	47
BAB IV	PENUTUP	56
16.	Kesimpulan	56
17.	Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN:		
1.	ALUR PIKIR. (Lampiran I)	
2.	ANALISIS SWOT. (Lampiran II)	
3.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP. (Lampiran III)	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Tabel Tenaga Kesehatan Umum Indonesia	14
Tabel 2 Data Personel Kesehatan Kemhan dan TNI	15
Tabel 3 Jumlah Pasar per wilayah	18
Tabel 4 Jumlah Perusahaan Obyek Wisata Komersil	19
Tabel 5 Daftar Laboratorium Rujukan Nasional	36
Tabel 6 Faktor Internal	48
Tabel 7 Faktor Eksternal	51
Tabel 8 Penghitungan Bobot IFAS	67
Tabel 9 Penghitungan Bobot EFAS	69
Tabel 10 Penghitungan Rating IFAS	71
Tabel 11 Penghitungan Rating EFAS	72
Tabel 12 Penghitungan Bobot dan Rating IFAS	75
Tabel 13 Penghitungan Bobot dan Rating EFAS	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Grafik Gabungan Covid-19 Indonesia	13
Gambar 2 Peta sebaran transmisi lokal dan wilayah terkonfirmasi	14
Gambar 3 Gelar Kogasgabpad di Indonesia	15
Gambar 4 Gelar Fasilitas Kesehatan TNI	17
Gambar 5 Gelar Rumah Sakit Lapangan dan Faskes Darurat TNI	18
Gambar 6 Kuadran SWOT	50



**OPTIMALISASI PERAN TNI DALAM Mendukung Pemerintah
Menangani Pandemi Guna Ketahanan Nasional**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Dinamika lingkungan strategis akhir-akhir ini menuntut kesiapan dan kemampuan pertahanan dari suatu negara untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang ada. Kita tentu sangat familiar dengan peribahasa latin dari seorang penulis militer Romawi, *Publius Flavius Vegetius Renatus* yang mengungkapkan “*Si vis pacem, para bellum*” yang jika kita artikan bermakna “bila ingin damai, maka bersiaplah untuk perang.”¹ Dalam kaitan dengan peribahasa tersebut diatas, maka TNI sebagai alat pertahanan negara harus senantiasa siap setiap saat dan sepanjang waktu untuk dikerahkan menghadapi segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan bangsa dan negara agar pembangunan nasional dapat berjalan tanpa hambatan dalam rangka menuju cita-cita nasional.

Relaksanaan tugas TNI dibagi dalam 2 bentuk, yakni Operasi Militer Untuk Perang (OMP), dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMSP adalah operasi yang diselenggarakan oleh TNI bukan dalam rangka perang melawan negara lain, operasi ini adalah untuk tugas-tugas lainnya di masa damai. Menurut sifatnya, OMSP dibedakan menjadi operasi yang bersifat tempur dan operasi yang bersifat non-tempur. Salah satu contoh OMSP bersifat non tempur adalah operasi untuk

¹ Oxford university press, *Si vis pacem, para bellum*, diakses pada 30 Januari 2022
<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-1900>

membantu pemerintah dalam upaya menanggulangi bencana.²

Sama halnya dengan ancaman militer, ancaman non-militer pun dapat mengganggu keamanan dan keselamatan bangsa. Salah satu contoh dari ancaman non-militer adalah ancaman dalam dimensi keselamatan umum. Dalam konteks keselamatan umum, kesehatan menjadi bagian yang terpenting di dalamnya. Beberapa wabah penyakit menular yang pernah berdampak pada kesehatan dan menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, diantaranya: SARS, Flu Burung, Flu Babi (*swine flu*), MERS-CoV dan yang saat ini sedang terjadi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dalam kurun waktu satu tahun sejak awal terdeteksinya Covid-19 di Indonesia hingga kemudian menjadi pandemi dan dinyatakan sebagai bencana nasional oleh pemerintah. Dampak Covid-19 membuat Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Indonesia menurun. Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Laboratorium Ketahanan Nasional pada akhir tahun 2019 dan 2020 menunjukkan turunnya Indeks Ketahanan Nasional dari skor 2,82 (kategori cukup tangguh) menjadi 2,70 (kategori kurang tangguh).³ Rincian penurunan IKN hasil penilaian pada 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Ketahanan demografi dari 2,83 menjadi 2,66.
- b. Ketahanan ideologi dari 2,56 menjadi 2,42.
- c. Ketahanan politik dari 2,83 menjadi 2,78.
- d. Ketahanan ekonomi dari 3,08 menjadi 2,65.

Pada tahun 2021 berdasarkan data dari Labkurtannas Lemhanas, Indeks Ketahanan Nasional (IKN) kembali turun menjadi 2,55 (kategori kurang tangguh), dengan rincian:

- a. Ketahanan demografi menjadi 3,37
- b. Ketahanan ideologi menjadi 2,28
- c. Ketahanan politik menjadi 2,31
- d. Ketahanan ekonomi menjadi 2,77

Dalam situasi seperti ini, seluruh pihak harus saling bahu membahu untuk terjun menangani pandemi Covid-19 secara paripurna. Sinergitas seluruh

² Mabes TNI, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/713/VII/2019 tentang Doktrin Operasi Militer Selain Perang TNI.

³ Yeremia, "Pandemi Covid-19 Turunkan Indeks Ketahanan Nasional", <https://www.beritasatu.com/nasional/702977/pandemi-covid19-turunkan-indeks-ketahanan-nasional>

komponen bangsa sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan pandemi ke depan. Untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diperkuat keberadaannya dengan Keppres Nomor 7 tahun 2020.

Pandemi Covid-19 merupakan kejadian darurat kesehatan dan bencana non alam. Sesuai dengan Inpres nomer 4 tahun 2019, Panglima TNI diinstruksikan untuk mengerahkan personel, sarana, dan prasarana dan upaya cegah, deteksi, respon dengan cepat sebelum, selama dan setelah terjadi darurat kesehatan dan atau bencana non alam. Terkait dengan hal tersebut, TNI telah mengerahkan sumber daya manusia dan sarana prasarananya sebagai bentuk peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19. Peran TNI dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 masih belum optimal. Operasi penegakan protokol kesehatan dan pengawasan penerapan PPKM serta pengerahan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh TNI serta pengerahan sarana prasarana TNI selama lebih dari 1 tahun tidak berhasil menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia. Dalam penanganan pandemi Covid-19 secara global, Indonesia diurutan ke 85, jauh dibawah dua negara di kawasan yakni Vietnam yang berada pada urutan ke 2 dan Taiwan yang berada pada urutan ke 3. Hal ini merupakan permasalahan, karena peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19 sangat diharapkan keberhasilannya oleh pemerintah guna Ketahanan Nasional.

Permasalahan belum optimalnya peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19 disebabkan oleh 3 permasalahan, yakni : pertama, kurang siapnya sumber daya manusia TNI secara kualitas dan kuantitas, kedua : kurang siapnya sarana prasarana kesehatan TNI, dan ketiga : kurangnya ketersediaan regulasi untuk mendukung tugas TNI dalam membantu menangani bencana non-alam berupa pandemi Covid-19. Ke tiga permasalahan tersebut diatas bila tidak dicarikan solusinya akan berimplikasi terhadap kecepatan pemerintah dalam menangani pandemi yang selanjutnya akan berdampak pada kondisi Ketahanan Nasional. Gangguan yang dapat ditimbulkan bukan hanya dari sisi ekonomi saja, namun akan mempengaruhi sektor politik, sosial, budaya, keamanan dan lain-lain. Pelibatan dan peran TNI guna mendukung pemerintah menangani pandemi, dalam bentuk dukungan SDM yang memadai, kesiapan sarana dan

prasarana, serta dukungan kelengkapan regulasi sangat penting untuk mengoptimalkan peran TNI dalam mendukung pemerintah mempercepat penanganan pandemi di Indonesia.

2. Perumusan Masalah.

Mengalir dari uraian latar belakang sebagaimana tergambar di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah “Bagaimana meningkatkan peran TNI guna mendukung pemerintah menangani pandemi?”. Dari rumusan masalah di atas, dapat ditarik beberapa pertanyaan kajian sebagai pokok bahasan yakni:

- a. Apa permasalahan belum optimalnya peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi?
- b. Apa penyebab permasalahan belum optimalnya peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi?
- c. Bagaimana mengoptimalkan peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi?

3. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran, analisis dan rekomendasi (pemecahan masalah) terhadap permasalahan belum optimalnya peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi guna Ketahanan Nasional.
- b. Tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kepentingan dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan upaya-upaya strategis untuk mengoptimalkan peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi, khususnya pandemi yang diakibatkan dari mutasi virus *Corona* yang kemungkinan besar dapat terjadi di masa yang akan datang.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

- a. Ruang Lingkup. Adapun ruang lingkup dalam penyusunan Taskap ini dibatasi pada peran TNI khususnya dilihat dari perspektif pelibatan sumber daya manusia TNI, pemanfaatan sarana dan prasarana

kesehatan TNI, serta dukungan kelengkapan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi dalam rangka Ketahanan Nasional.

b. **Sistematika.** Untuk mempermudah penulisan dan memahami permasalahan serta analisis pemecahan masalah yang akan diuraikan dalam pembahasan, maka Taskap ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) **BAB I** Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah tentang peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi;
- 2) **BAB II** Tinjauan Pustaka. Pada Bab ini dijelaskan beberapa landasan pemikiran yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, data dan fakta serta hasil kajian yang mendukung penelitian, kerangka teoritis serta situasi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- 3) **BAB III** Pembahasan. Pada Bab ini akan dibahas dan analisis data, fakta dengan pendekatan peraturan perundangan, teori serta perkembangan lingkungan strategis guna menemukan solusi mengoptimalkan peran TNI dalam mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi guna ketahanan Nasional;
- 4) **BAB IV** Penutup. Sebagai penutup, Bab ini menguraikan tentang temuan dan jawaban atas pertanyaan kajian pada Bab I serta rekomendasi untuk mengoptimalkan peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi guna ketahanan nasional.

5. **Metode dan Pendekatan.**

a. **Metode.** Penulisan Taskap ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dalam menganalisa dan membahas terkait dengan optimalisasi peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi. Hal ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis berbagai data dan fakta berdasarkan pendekatan SWOT, serta informasi lingkungan strategis yang ada.

b. Pendekatan. Taskap ini disusun dengan pendekatan perspektif kepentingan nasional dengan menggunakan referensi ketentuan perundangan terkait yang berlaku, didukung dengan pengamatan dan pengalaman langsung penulis sebagai personel TNI dilengkapi dengan pendekatan studi pustaka yang tersedia baik cetak maupun elektronik untuk memformulasikan strategi yang tepat guna mengoptimalkan peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi penyakit menular dengan analisis deskriptif secara menyeluruh terhadap pokok permasalahan sehingga diperoleh solusi strategis guna menyelesaikan permasalahan.

6. Pengertian.

a. **Pandemi.** Pandemi adalah kejadian penyebaran penyakit yang menginfeksi orang dalam jumlah yang besar, berlangsung dalam waktu singkat dan hampir bersamaan di berbagai tempat, dan meliputi wilayah yang luas hingga meliputi beberapa negara atau hampir seluruh dunia.⁴

b. **Penyakit Menular.** Penyakit yang disebabkan oleh virus yang menginfeksi manusia dan menular ke manusia lain hingga manusia lainnya menjadi terinfeksi atau sakit. Penularan penyakit ini selalu melalui media seperti kontak langsung dengan penderita, udara, air, binatang dan lainnya.⁵

e. **Protokol kesehatan.** Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi Covid-19.⁶

f. **Tenaga kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

g. **Fasilitas kesehatan** adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

⁴ Kemdikbud, "Pengertian Pandemi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PANDEMI>

⁵ Dinkes Agam, "Penyakit Menular", [tps://dinkes.agamkab.go.id/?agam=informasi&se=detil&id=513](https://dinkes.agamkab.go.id/?agam=informasi&se=detil&id=513)

⁶ Fatimah, "Protokol Kesehatan Adalah Aturan saat Pandemi Covid-19", Terto.id, <https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Dalam bab ini ditampilkan tinjauan pustaka dari beberapa peraturan perundang-undangan, landasan teori, fakta dan data, serta dinamika lingkungan strategis yang berkaitan dengan bahasan yakni peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19 yang menjadi acuan/referensi untuk mempermudah proses analisis dan bahasan dalam rangka mencari upaya, pemecahan serta solusi dari sejumlah permasalahan yang ditemukan sehingga peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi mendapatkan strategi pemecahannya agar peran TNI lebih optimal dalam mendukung pemerintah menangani pandemi lainnya di masa mendatang.

8. Peraturan Perundang-undangan.

a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa TNI memiliki fungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.⁷ TNI memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁸ Tugas pokok tersebut terbagi dalam dua bentuk operasi, yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.⁹ Selanjutnya di pasal 7 ayat (2), terdapat dua bentuk pengerahan TNI yang dapat dijadikan dasar bagi TNI mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi, yaitu membantu pemerintahan di daerah dan membantu

⁷ Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

⁸ Ibid, Pasal 7 ayat (1)

⁹ Ibid, Pasal 7 ayat (2)

menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.¹⁰

b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Didalamnya disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah penanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Dalam hal ini pemerintah membentuk BNPB yang berfungsi merumuskan, merencanakan serta menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Selain itu, didalamnya dijelaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana.

c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah saja tidak cukup untuk mewujudkan derajat kesehatan yang baik. Secara khusus, pada pasal 18 disebutkan bahwa peran aktif warga negara dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perlu di gerakkan dan diarahkan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan bangsa setinggi-tingginya.

d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Pencegahan penyebaran penyakit menular covid-19 dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Undang-undang ini memuat ketentuan tentang upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat dan kerjasama internasional.

f. Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit,

¹⁰ Ibid, Pasal 7 ayat (2) hurup b.

pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi dan kimia. Secara khusus didalamnya dituangkan instruksi kepada Menteri Pertahanan untuk mengerahkan sumber daya sektor pertahanan dan kepada Panglima TNI untuk pengerahan personil, sarana, dan prasarana serta memberikan komando penanggulangan taktis dalam kedaruratan kesehatan masyarakat Indonesia.

g. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, maka pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

h. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang mengalami perubahan adalah ketentuan pada pasal 8 tentang Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan ketentuan pada pasal 13 terkait pendanaan.

i. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19). Keputusan ini tentang penetapan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kerangka Teoritis.

a. Teori *Total Defence* (Sistem Pertahanan Semesta). Teori ini merupakan sebuah kerangka kerja untuk merespon secara komprehensif dan terintegrasi terhadap seluruh bentuk ancaman dan tantangan, baik berupa ancaman keamanan serupa terorisme, maupun ancaman lainnya, seperti wabah penyakit. Dalam *total defense*, semua lembaga pemerintah yang relevan, termasuk seluruh masyarakat bersatu menghadapi ancaman dan tantangan secara efektif. Konsep ini melibatkan lima aspek pokok

kehidupan masyarakat yakni militer, ekonomi, sipil, sosial, dan psikologi. Di Indonesia, teori *total defense* dikenal sebagai Pertahanan Rakyat Semesta, dengan ide dasar bahwa perlawanan rakyat (baik perlawanan bersenjata maupun tanpa senjata) dengan asas tidak kenal menyerah. Penggunaan istilah "Total" dalam strategi pertahanan Indonesia pun tertulis dalam Buku Putih Pertahanan, Doktrin Pertahanan dan Strategi Pertahanan yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan tahun 2008.¹¹ Menurut *General (ret.) Ants Laaneots*, *total defense* didefinisikan sebagai berikut : "*Total defense means that the mental, physical, economic and other potential of government structures, local governments, defense forces and the entire nation must be in a continual state of preparedness to manage a situation of crisis and to act as one in order to prevent and avert danger or attack and to preserve the nation.*"¹² Kata kunci dalam pernyataan Jenderal Laneots dalam kesiapan menangani situasi krisis adalah perlu keterlibatan pemerintah, militer, dan seluruh (komponen) bangsa.

b. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Di dalam buku "Manajemen Sumber Daya Manusia", Prof. Dr. Sondang Siagian, MPA. mengatakan bahwa dalam proses perencanaan SDM perlu diawali dengan inventarisasi SDM yang sudah ada di dalam organisasi.¹³ Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan khususnya yang berhubungan dengan jumlah personel, kualifikasi kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Maksud dari inventarisasi ini adalah agar organisasi bisa merencanakan program untuk meningkatkan/ mengembangkan kualitas SDM. Terkait dengan teori diatas, maka kemampuan SDM prajurit TNI saat ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas penanggulangan bencana pandemi, semakin baik kualitas SDM TNI, maka akan semakin baik dalam mendukung pelaksanaan tugas.

¹¹ Permanto, "Optimalisasi Pertahanan Militer Guna Memantapkan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Keutuhan NKRI", Perpustakaan Lemhannas RI, diakses pada 30November2021, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000010584/swf/4965/files/basic-html/page1.html>

¹² Margus Kuul, "Civil Resistance: An Essential Element of a Total Defense Strategy." Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey-California, 2014, hal. 3.

¹³ Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA, Manajemen SDM, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2001, h 45.

- c. Teori Fungsi Dasar Manajemen. Manajemen senantiasa menyangkut empat hal yang saling terkait satu dengan yang lain, yang dikenal sebagai POAC. POAC merupakan fungsi dasar manajemen yang diperkenalkan oleh G. R. Terry. Menurut G. R. Terry dalam buku *Principle of Management* (Soekarna, 2011:10), fungsi manajemen tersusun atas *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*. *Planning* adalah suatu proses menyusun sebuah kerangka kerja yang objektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebuah organisasi. Setelah merencanakan semua hal yang diperlukan, proses selanjutnya adalah *organizing* yakni memberdayakan segala sumber daya yang dipunyai, khususnya sumber daya manusia. Proses ini akan menghasilkan pembagian pekerjaan/ pembagian tim dengan tugas tertentu. Implementasi (*actuating*) rencana yang telah dibuat sebelumnya menjadi suatu aksi menjadi tahapan berikutnya yang penting untuk mencapai keberhasilan. Perencanaan yang matang dan proses aktualisasi sesuai tahapan yang benar akan berdampak pada lancarnya manajemen. *Controlling* merupakan tahapan langkah berikutnya yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa alur proses telah berjalan sesuai yang direncanakan. Sasaran utama *controlling* adalah untuk menjaga seluruh proses berjalan sesuai dengan rencana.
- d. Teori Analisis SWOT (IFAS, EFAS).¹⁴ Analisis SWOT adalah analisis yang terkait dengan aktifitas mengenali berbagai faktor secara runtut untuk merumuskan strategi. Analisis SWOT didasarkan pada cara berpikir lurus yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Dalam suatu tabel IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) dirumuskan faktor-faktor strategis dalam kerangka kekuatan dan kelemahan. Di mana faktor-faktor strategis internal tersebut diberikan bobot, rating, dan skor. Begitu pula dengan tabel EFAS (*Eksternal Factors Analysis Summary*) dalam kerangka peluang dan ancaman.
- e. Teori Sinergitas. Menurut Najiyati dan Rahmat (2011), Sinergi didefinisikan sebagai kombinasi atau gabungan unsur atau bagian yang bisa

¹⁴ Rangkuti, Teknik membedah Kasus Bisnis, Cara perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI, 2015, h 20.

menghasilkan output lebih bagus dan lebih besar. Artinya sinergi bisa dipahami sebagai operasi gabungan atau gabungan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Berdasarkan konsep sinergitas diatas, maka bentuk dari sinergitas tersebut diataranya adalah:

- 1) Koordinasi, dalam koordinasi tersebut perlu ditetapkan hubungan antara stakeholder terkait apakah bersifat hubungan vertikal, hubungan horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan.
- 2) Komunikasi, dalam komunikasi pertukaran informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara pihak satu dengan pihak yang lain.

10. Data dan Fakta.

a. Pandemi Covid-19 di Indonesia.

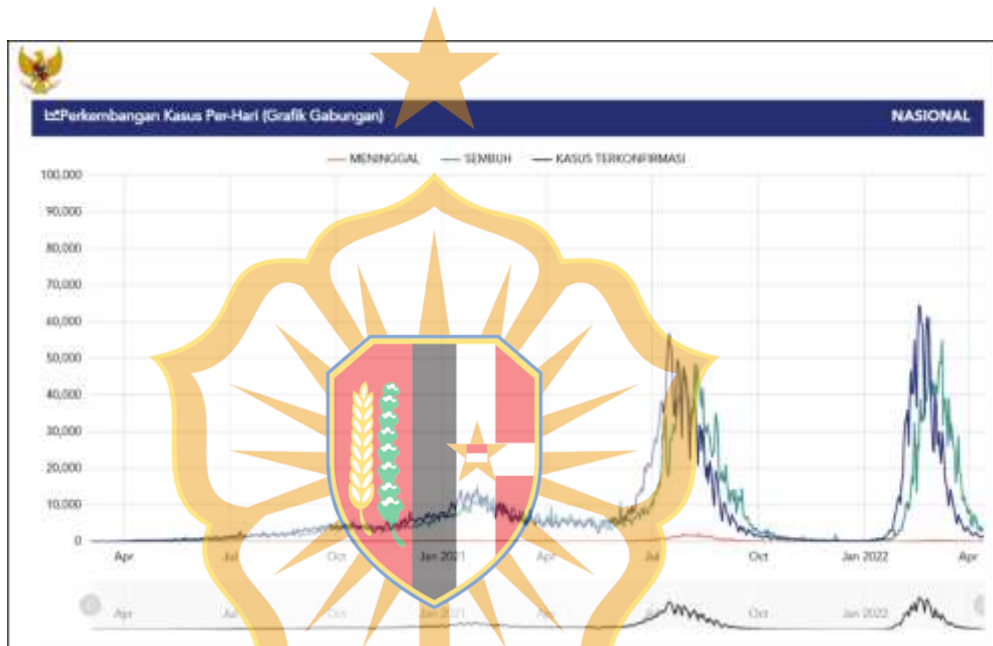
Penghujung tahun 2019 ditemukan wabah yang disebabkan virus Covid-19 di provinsi Wuhan China, dalam waktu singkat wabah tersebut telah menular secara global hingga WHO menyatakan penularan virus ini sebagai Pandemi Covid-19. Covid-19 adalah keluarga dari *Corona Virus* yang telah ada sejak tahun 1960an.¹⁵ Tercatat beberapa virus dari jenis ini telah menjadi pandemi di berbagai negara, antara lain: *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV)*, *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*, dan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Virus Covid-19 sejak pertama kali ditemukan hingga saat ini telah mengalami mutasi sebanyak 54 kali di hampir seluruh belahan dunia.¹⁶ Mutasi virus merupakan sifat seluruh virus, dengan kata lain virus akan selalu bermutasi. Seorang pakar dari Universitas di London, *Lucy Van Dorp*, menyebutkan bahwa untuk bertahan dan berkembang biak virus akan selalu bermutasi.¹⁷ Varian baru tampaknya akan selalu muncul, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan

¹⁵ Mengetahui Virus Corona: Sejarah, Jenis, dan Macam Penyakit yang Disebabkannya, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/16/133122482/mengenal-virus-corona-sejarah-jenis-dan-macam-penyakit-yang?page=all> , diakses 15April2022.

¹⁶ Mutasi Virus Covid-19 Berbahayakah?, <https://www.uir.ac.id/mutasi-virus-covid-19-berbahayakah/> , diakses 15April2022.

¹⁷ Ternyata Ini Penyebab Munculnya Varian & Mutasi Baru Covid-19, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220202074532-37-312155/ternyata-ini-penyebab-munculnya-varian-mutasi-baru-covid-19> , diakses 15April2022.

perlu upaya untuk mengantisipasi. Virus ini pertamakali teridentifikasi di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah atas kondisi ini, diantaranya dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mengkoordinasikan dan menyinergikan seluruh upaya mengatasi pandemi Covid-19, memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, memperketat jalur masuk dari dan ke luar negeri, penguatan bidang kesehatan dalam penanganan penderita Covid-19, mensosialisasikan 3M dan 3T, dan vaksinasi.



Gambar 1 Grafik Gabungan Covid-19 Indonesia.

Sumber: Satgas Penangan Covid-19.¹⁸

Dari data grafik gabungan Covid-19, angka kasus terkonfirmasi mulai meningkat drastis di 16 Juni 2020 hingga mencapai puncaknya di 15 Juli 2020. Pada masa itu sejumlah rumah sakit di Indonesia penuh dengan pasien Covid-19 dan mengalami krisis stok oksigen hingga IGD yang penuh oleh pasien Covid-19, di beberapa tempat bahkan hingga mendirikan tenda-tenda untuk menampung pasien Covid-19. Kemenkes mengakui saat itu fasilitas layanan kesehatan di Indonesia berada pada kondisi kurang memadai.¹⁹ Disamping fasilitas layanan kesehatan, ketersediaan dokter

¹⁸ <https://covid19.go.id/peta-sebaran> , diakses 15April2022

¹⁹ Covid di Indonesia: IGD dan ICU sejumlah rumah sakit penuh, pasien dirawat di tenda - 'Kondisinya darurat mirip perang', <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57711018> , diakses 15April 2022

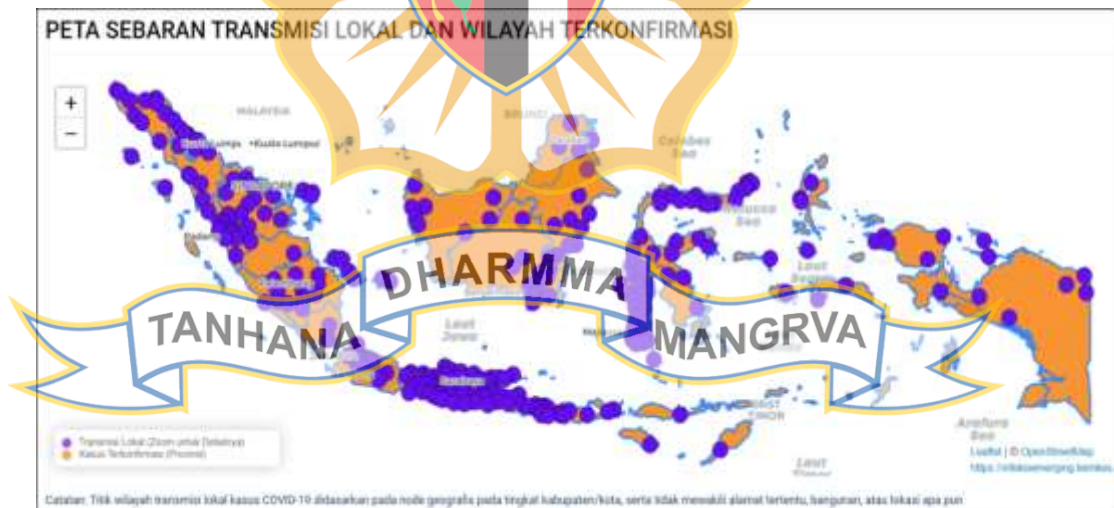
merupakan hal penting dalam penanganan pandemi Covid-19. Data yang ada tahun 2022 jumlah dokter seluruh Indonesia adalah 106.316 orang yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten dan kota. (Tabel 1 Tenaga Kesehatan Umum Indonesia). Jumlah dokter Indonesia adalah 0,4 per 1000 penduduk, sama dengan 4 dokter untuk 10.000 penduduk²⁰, jumlah ini dibawah standar WHO yakni 1 dokter per 1000 penduduk pada satu daerah²¹.

NO	TENAGA KESEHATAN UMUM INDONESIA	JUMLAH
1	Dokter	106.316
2	Perawat	438.234
3	Tenaga Farmasi	77.631

Tabel 1 Tabel Tenaga Kesehatan Umum Indonesia.

Sumber : Data diolah kembali oleh Penulis dari Buku Statistik Indonesia 2022, Badan Pusat Statistik

April 2022 penularan Covid-19 tercatat 6.038.664 terkonfirmasi dan 155.820 meninggal, data terkonfirmasi tersebut tersebar dari 34 Provinsi dan 510 Kabupaten/Kota. Luas area terkonfirmasi ini menjadi tantangan dalam pengawasan penerapan PPKM guna menghentikan atau setidaknya menahan laju penularan Covid-19.



Gambar 2 Peta sebaran transmisi lokal dan wilayah terkonfirmasi.

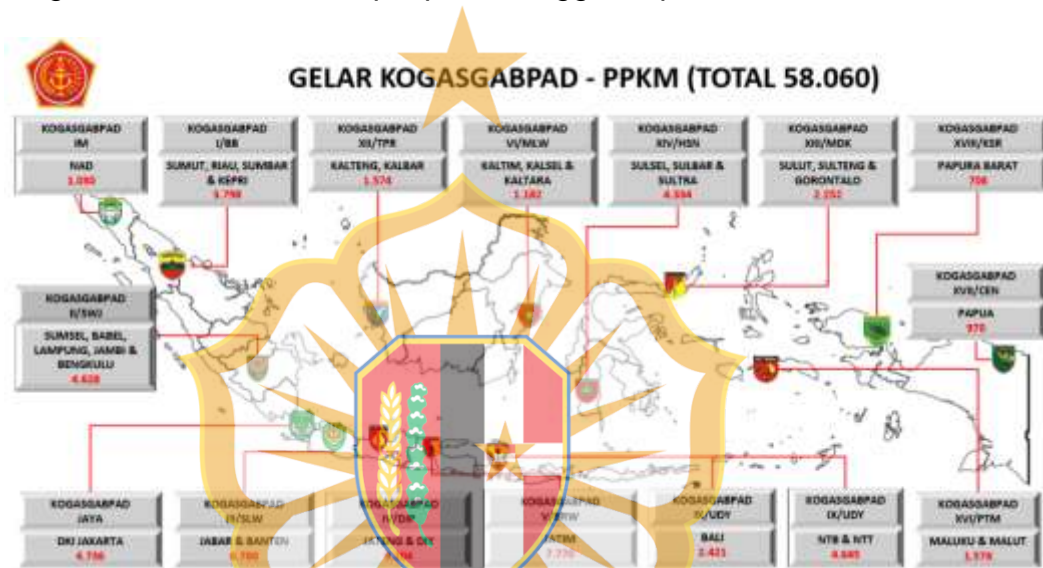
Sumber : Kemenkes RI, 2022.

²⁰ Rasio Dokter Indonesia Terendah Kedua di Asia Tenggara, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/02/rasio-dokter-indonesia-terendah-kedua-di-asia-tenggara>, diakses 15 April 2022.

²¹ Rasio Dokter Tak Imbang, Bappenas Minta Nadiem Perbanyak FK, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210917031043-20-695511/rasio-dokter-tak-imbang-bappenas-minta-nadiem-perbanyak>, diakses 15 April 2022

b. **Peran TNI dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.**

TNI telah membentuk sejumlah Kogasgabpad (Komando Tugas Gabungan Terpadu) dengan komando dari seluruh Panglima Komando Daerah Militer di daerah dimana didalamnya turut terlibat unsur-unsur gabungan dari TNI dan Polri, kementerian serta lembaga terkait lainnya. Hal ini dilakukan agar dukungan penanganan pandemi Covid-19 dapat teroganisir mulai dari level pimpinan hingga ke pelaksana di daerah.



Gambar 3 Gelar Kogasgabpad di Indonesia
Sumber: Mabes TNI, 2022.

Di bidang kesehatan, TNI mengerahkan tenaga kesehatan, terdiri dari tenaga medis, paramedis, dan tenaga pendukung seperti dokter militer, perawat, dan tenaga non-medis yang ditempatkan di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dan RS Khusus Covid-19 di Pulau Galang. TNI memiliki personil kesehatan sejumlah 27.163 orang, sejumlah 1188 diantaranya adalah dokter umum, dokter berbagai spesialis, paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya yang spesialisasi dan bidangnya secara umum dibutuhkan untuk menangani pasien Covid-19. SDM kesehatan yang dimiliki TNI saat ini tersebar di 116 Rumah Sakit di berbagai daerah.

NO	KEAHLIAN/PROFESI	PERSONEL KESEHATAN TNI					JUMLAH
		MABES TNI	TNI AD	TNI AL	TNI AU	KEM HAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	MEDIS						
1	Dokter Umum	24	644	334	153	33	1.188

2	Dokter Gigi	12	158	143	434	4	751
3	Apoteker/Farmasi	7	143	107	66	7	330
B	PARAMEDIS						
1	Keperawatan	73	10.694	3.238	1.918	327	16.250
2	Perawat Spesialis		7			2	9
C	MEDIS SPESIALIS						
1	Akupunktur	0	3	0	1	0	4
2	Anak	0	82	6	11	4	103
3	Andrologi	0	1	0	0	0	1
4	Anesthesi	1	90	14	14	5	124
5	Bedah	0	119	20	17	2	158
6	Bedah Anak	0	5	3	0	0	8
7	Bedah Orthopedi	0	47	12	7	2	68
8	Bedah Plastik	0	4	3	1	2	10
9	Bedah Saraf	0	15	9	2	1	27
10	Bedah Thorax	0	6	2	1	0	9
11	Fisik Dan Rehab Medik	0	8	5	5	4	22
12	Gizi Klinik	0	8	0	0	0	8
13	Kardiologi	0	22	8	5	2	37
14	Kesehatan Olah Raga	0	1	0	0	0	1
15	Kedokteran Nuklir	0	12	0	0	0	12
16	Kesehatan Jiwa	0	29	11	10	2	52
17	Kulit Dan Kelamin	0	37	5	3	1	46
18	Mata	0	63	9	9	1	82
19	Obgyn	0	108	8	9	4	129
20	Paru	0	32	11	9	2	54
21	Patologi Anatomi	0	11	6	6	1	24
22	Patologi Klinik	0	39	6	0	1	46
23	Penyakit Dalam	0	48	15	18	4	85
24	Radiologi	0	113	13	13	3	142
25	Rehabilitasi Medik	0	2	0	0	0	2
26	Saraf	0	46	7	11	3	67
27	THT	0	63	17	9	1	90
28	Urologi	0	15	5	5	1	26
29	Kedoktrn Penerbangan	1	0	2	9	0	12
30	Kedokteran Emergency	0	0	3	1	2	6
31	Mikrobiologi Klinik	0	0	0	1	0	1
32	Farmakologi Klinik	0	0	0	1	0	1
D	DOKTER SP. GIGI						
1	Penyakit Mulut	0	0	3	1	0	4
2	Bedah Mulut	0	12	11	9	1	33
3	Konservasi Gigi	0	18	25	13	1	57
4	Ortho	2	6	16	7		32
5	Periodonsi	0	5	17	3	1	26
6	Prosthodontsi	0	6	24	5	0	35
7	Pedodontsi	0	2	7	4	0	13
E	DOK. SUB SPESIALIS						
1	Onkologi	0	6	6	2	0	14
2	Digestif	0	3	3	1	0	7
3	Kon Ginjal	0	3	0	0	0	3
4	TKV	0	0	0	1	0	1
5	Forensik	0	0	0	1	0	1
6	Subspesialis Bedah	0	3	1	0	0	4
7	Subspesialis Peny dlm	0	0	2	0	1	3
8	Subspesialis Anak	0	0	1	0	0	1
9	Subspesialis Obgyne	0	0	1	0	0	1
10	Subspesialis Mata	0	0	1	0	0	1
11	Subspesialis THT	0	0	1	0	0	1
12	Subspesialis Saraf	0	0	1	0	0	1
13	Subspesialis Orthopedi	0	0	3	0	2	5
14	Subspesialis KIC	0	0	3	0	0	3

15	Anestesi & Reanimasi	0	0	0	2	0	2
F	TENAGA KESH LAIN						
	Tenaga Kesehatan Lain	73	5.724	726	407	112	6.930
	JUMLAH	193	18.463	4.874	3.205	540	27.163

Tabel 2 Data Personel Kesehatan di 116 RS Kemhan dan TNI
Sumber : Ditkes Ditjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, 2020



Gambar 4 Gelar Fasilitas Kesehatan TNI
Sumber : Mabes TNI.

TNI memiliki sejumlah fasilitas kesehatan yang terdiri dari 116 Rumah Sakit dan 656 buah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Seluruh fasilitas kesehatan TNI tersebut memiliki standar kemampuan memberikan pelayanan kesehatan umum. Terkait dengan perawatan pasien Covid-19, kemampuan dari 116 RS TNI masih sangat minim. Dari keseluruhan Rumah Sakit TNI tersebut hanya terdapat 17 ruangan yang memenuhi spesifikasi sebagai ruang isolasi bertekanan negatif. Disamping itu, melihat kondisi lapangan terkait dengan sangat terbatasnya fasilitas rawat untuk pasien Covid-19, TNI telah melakukan renovasi sejumlah fasilitas ruang perawatan intensif di Rumah Sakit-Rumah Sakit TNI agar kapasitas tampungnya bertambah. TNI juga merenovasi sejumlah ruangan-ruangan di Rumah Sakit-Rumah Sakit TNI untuk dijadikan fasilitas rawat pasien Covid-19, mendirikan tenda-tenda Rumah Sakit Lapangan di beberapa tempat untuk merawat penderita Covid-19 yang tidak tertampung di Rumah Sakit TNI, dan merubah beberapa fasilitas gedung TNI menjadi tempat isolasi bertekanan negatif. Selain Rumah Sakit, sejumlah alutsista turut diberdayakan, yakni 2 Kapal Rumah

Sakit dan 2 Kapal LST yang dimodifikasi sebagai kapal produksi oksigen yang berkemampuan mobilitas untuk ke daerah-daerah terpencil.



Gambar 5 Gelar Rumah Sakit Lapangan dan Fasilitas Kesehatan Darurat TNI. Sumber : Mabes TNI.

Selain tenaga kesehatan, SDM TNI melaksanakan operasi Penegakan Protokol Kesehatan dan PPKM dengan prioritas provinsi, kabupaten, kota yang kasus terkonfirmasi tinggi. TNI turun mengamankan sejumlah obyek keramaian. Terdapat 1.800 obyek atau fasilitas umum yang dijaga seperti pusat pasar, mall, terminal, dan stasiun. Jumlah obyek/fasilitas tersebut masih sangat kecil dibanding jumlah riil pasar rakyat dan obyek wisata seluruh Indonesia yang mencapai puluhan ribu.



Tabel 3 Jumlah Pasar per wilayah 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Februari 2021



Tabel 4 Jumlah Perusahaan Obyek Wisata Komersil 2019
Sumber : Badan Pusat Statistik Agustus 2021

11. Perkembangan Lingkungan Strategis Terkait Pandemi (Covid-19).

Pelibatan militer dalam pandemi bukanlah hal yang baru dalam aktivitas politik Internasional. Perkembangan lingkungan strategis pada tataran global, regional, dan nasional yang makin dinamis dan kompleks, telah memunculkan ancaman non militer yang salah satunya adalah pandemi. Pandemi Covid 19 merupakan salah satu pandemi yang tengah melanda dunia dan menjadi perhatian bersama seluruh pemimpin dunia. *World Health Organization* (WHO) mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada pelibatan peran militer di banyak negara untuk membantu pemerintahnya dalam percepatan penanganan dampak pandemi.

a. Global. Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat meluas hingga menjadi pandemi global, telah mempengaruhi kebijakan beberapa negara untuk melibatkan militer. China mengerahkan sejumlah besar sumber daya, peralatan medis, puluhan ribu staf medis, relawan, militer dan pekerja konstruksi ke Wuhan dan Hubei untuk melawan penyebaran virus. Beberapa personel militer ini memiliki pengalaman dalam memerangi SARS dan Ebola.²² Amerika sempat menjadi episentrum virus Corona yang baru, negara tersebut mengalami lonjakan pasien setiap harinya. Hampir seluruh

²² Christiastuti, "China Kerahkan 450 Staf Medis Militer ke Kota Asal Wabah Virus Corona", Detiknews, diakses pada 4 Desember 2021, <https://news.detik.com/internasional/d-4872965/china-kerahkan-450-staf-medis-militer-ke-kota-asal-wabah-virus-corona>

rumah sakit di beberapa negara bagian penuh. Alhasil, Amerika mengerahkan aset militer berupa kapal militer untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi dengan pelibatan kapal militer, USNS *Comfort* (T-AH-20).²³ Di benua Eropa pada medio maret 2020, Italia sempat mencatat angka kematian tertinggi kasus meninggal pasien Covid-19, bahkan melampaui China. Italia memperketat *lockdown*, kekuatan militer Italia dilibatkan untuk memastikan tidak ada warga berkeliaran yang berpotensi mempercepat penyebaran virus, selain itu personil militer bertugas menjaga keamanan dan mengawasi jalanan kota untuk menertibkan warga yang membandel dari kebijakan *lockdown*. Truk-truk militer Italia juga dilibatkan untuk membantu memindahkan peti mati pasien Covid-19 ke provinsi-provinsi tetangga dari kota episentrum penyebaran virus corona (Bergamo, Italia).

Di awal pandemi, WHO menerbitkan panduan langkah-langkah koordinasi dalam menangani wabah penyakit. Pertama, panduan koordinasi antara para pemangku kepentingan, tidak hanya koordinasi tentang tugas namun juga tentang manajemen finansial dan sumber daya. Kedua, membuat informasi kesehatan yang berisi pengawasan wabah penyakit dan informasi mengenai hasil dan dampak dari intervensi atau kebijakan yang telah dilakukan. Ketiga, menangani *infodemic*, yaitu penyebaran informasi secara masif dan cepat termasuk informasi yang salah, rumor, gosip, dan informasi lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Keempat, melakukan intervensi di bidang kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi penularan, morbiditas (*morbidity*), kematian dan dampak negatif terhadap sistem kesehatan dan sektor politik serta sektor lainnya.²⁴

b. Regional. Pandemi Covid-19 juga dialami oleh negara-negara di kawasan regional. Mei 2020, militer negara ASEAN membahas kerja sama penanggulangan Covid-19 di kawasan untuk mencegah gelombang kedua wabah penyakit ini. Pusat Kedokteran Militer ASEAN/*Asean Center of Military Medicine* (ACMM) mengadakan pertemuan virtual dan dihadiri oleh

²³ Istman Musaharun, "Hadapi Virus Corona, Amerika Andalkan Kapal Militer", Tempo, diakses pada 3 Desember 2021, <https://dunia.tempo.co/read/1325909/hadapi-virus-corona-amerika-andalkan-kapal-militer>

²⁴ WHO, "Managing Pandemics", World Health Organization, diakses pada 4 Desember 2021, <https://www.who.int/emergencies/diseases/managing-epidemics-interactive.pdf>

10 negara anggota ASEAN, Amerika Serikat, Selandia Baru, India, Jepang, Cina, Rusia, Korea Selatan, dan Australia.²⁵ Sekjen ACMM Mayor Jenderal *Pramote Imwathana* (Thailand) mengatakan setiap negara ASEAN memiliki program penanggulangan krisis yang dilaksanakan dengan dukungan angkatan bersenjata, artinya kerja sama sipil-militer dapat dilakukan di fasilitas karantina untuk pengawasan terhadap pasien yang melaksanakan isolasi tanpa gejala serta isolasi untuk warga negara atau pendatang yang baru kembali dari luar negeri.

c. Nasional. Pandemi atau penyebaran wabah di wilayah yang luas, merupakan ancaman non militer nyata sebagaimana dinyatakan Buku Putih Pertahanan Indonesia yang diterbitkan Kementerian Pertahanan RI tahun 2015. Ancaman non militer lainnya sebagaimana tertulis buku tersebut diantaranya; bencana alam, perubahan iklim, aksi terorisme, ketahanan pangan, air, dan energi. Respon pemerintah terhadap pandemi diimplementasikan melalui diterbitkannya Keppres No. 7/2020 pada bulan Maret, dan Keppres No. 9/2020 pada bulan April. Keppres tersebut merupakan dasar hukum pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pada Keppres No. 9/2020, Kementerian Pertahanan adalah sebagai anggota pengarah, dan sebagai anggota pelaksana. Kementerian Pertahanan merupakan kementerian yang merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan pertahanan termasuk dengan kebijakan penggunaan kekuatan TNI dan komponen pertahanan lainnya untuk membantu kementerian dan lembaga dalam menghadapi pandemi Covid-19.

²⁵ Gozali Idrus, "ASEAN kerja sama antisipasi gelombang kedua Covid-19", Anadolu Agency, diakses pada 3 Desember 2021, <https://www.aa.com.tr/id/regional/asean-kerja-sama-antisipasi-gelombang-kedua-covid-19-/1855787>

BAB III

PEMBAHASAN

12. **Umum.** Pertahanan Negara Indonesia menganut Sistem Pertahanan Semesta²⁶, artinya adalah pertahanan negara diselenggarakan dengan kekuatan militer dan nonmiliter secara terpadu dalam menghadapi setiap bentuk ancaman yang akan mengganggu kedaulatan dan keselamatan bangsa. Penyiapannya dilakukan oleh Pemerintah secara dini, total, terpadu, terarah dan berlanjut.²⁷ Dalam perspektif pertahanan negara yang diselenggarakan secara semesta, kerjasama seluruh komponen masyarakat yang mencakup peran pemerintah, militer dan sipil diperlukan dalam rangka mewujudkan pertahanan negara Indonesia untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman non-militer yang berwujud bencana alam maupun non alam, dimana salah satu bentuk bencana non alam adalah seperti yang sedang terjadi saat ini yaitu pandemi Covid-19.

Pandemi merupakan salah satu bentuk ancaman non militer nyata yang dampaknya bisa setara (atau lebih buruk) dengan ancaman militer yang menimbulkan ancaman bagi keselamatan dan keamanan bangsa. Perlu diakui, tidak ada negara di dunia yang siap menghadapi krisis kesehatan berupa pandemi yang secara nyata dapat merembet ke krisis ekonomi. Oleh karenanya, semakin dini persiapan yang dilakukan dan dipimpin oleh pemerintah merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi pandemi. Sekuritisasi menghadapi ancaman nonmiliter berupa pandemi yang diklasifikasikan sebagai ancaman nyata dalam buku putih pertahanan, dihadapi dengan menggunakan pendekatan *multi agency* yang mengamanatkan kepada kementerian dan lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Disini terlihat bahwa 'panglima' perang atau unsur utama dalam melawan pandemi adalah Kementerian Kesehatan. Selain unsur utama, terdapat pula unsur pendukung yang memperkuat yaitu kementerian atau lembaga lainnya, pemerintah daerah, TNI, Polri serta segenap komponen bangsa lainnya yang dapat memperkuat unsur utama.

²⁶ Doktrin Pertahanan Negara, Kemhan RI

²⁷ Kemhan, Buku Putih Pertahanan, 2015

13. **Permasalahan belum optimalnya peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi.**

Perkembangan lingkungan strategis telah menciptakan perubahan terhadap kompleksitas ancaman. Sebagai alat negara di bidang pertahanan, TNI berfungsi sebagai penangkal, penindak dan pemulih terhadap setiap bentuk ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan negara serta keselamatan bangsa yang datang dari luar maupun dalam negeri yang dilaksanakan dalam bentuk Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas OMP maupun OMSP, TNI dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengatasi segala bentuk ancaman, termasuk wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia.²⁸ Tuntutan ini menjadi jelas dengan memperhatikan dua Instruksi Presiden RI yang ada terkait dengan pandemi, yang pertama: Instruksi Presiden RI (Inpres RI) nomer 4 tahun 2019, tanggal 17 Juni 2019, didalamnya salah satu instruksi secara khusus kepada Menteri Pertahanan untuk mengerahkan sumber daya pertahanan dan kepada Panglima TNI untuk pengerahan personil, sarana, dan prasarana serta komando penanggulangan taktis dalam kedaruratan kesehatan masyarakat dan atau bencana non alam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi dan kimia, kedua: Instruksi Presiden RI nomer 5 tahun 2020, tanggal 4 Agustus 2020, dimana salah satu instruksi khusus kepada Panglima TNI untuk mengerahkan kekuatannya mendukung penegakan disiplin protokol kesehatan dan pembinaan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam mencegah penularan Covid-19.

Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020, Indonesia menetapkan wabah Covid-19 ini sebagai bencana non alam dan bencana nasional pada 13 April 2020. Menyikapi pandemi Covid-19, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 dengan menunjuk Kepala BNPB sebagai ketua Pelaksana, dan Asisten Operasi Panglima TNI sebagai Wakil Ketua Pelaksana. Sejak saat itu TNI aktif terlibat mendukung pemerintah dalam upaya-upaya menghentikan penyebaran virus Covid-19 di masyarakat.

²⁸ UU NO 23 Tahun 2019 Psl 7 ayat 3

Secara global, pengeralahan kekuatan militer dalam pandemi menjadi suatu keniscayaan di berbagai negara dunia, banyak negara mengerahkan kekuatan militernya dalam menangani pandemi di negara masing-masing seperti China, Amerika, Italia dan lainnya termasuk di Indonesia. Berbagai aksi telah dilakukan oleh TNI berdasarkan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. TNI mengerahkan SDM, Sarpras serta komando taktis dalam penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri. Tercatat sejumlah 58.060 personil TNI, 27.163 personil kesehatan TNI, 116 Rumah Sakit, 2 KRI Rumah Sakit dan sejumlah alutsista dan fasilitas TNI lainnya dikerahkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Secara garis besar, peran TNI dalam mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 mencakup beberapa bidang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bidang keamanan. TNI melaksanakan pengamanan perbatasan terhadap keluar masuk pendatang, selain itu TNI melaksanakan Operasi Penegakan Protokol Kesehatan dan juga pengawasan PPKM di hampir seluruh daerah di Indonesia,
- b. Bidang kesehatan. TNI mengerahkan tenaga kesehatan seperti tenaga medis, paramedis, serta tenaga kesehatan lainnya, yang telah ditempatkan di Rumah Sakit Wisma Atlet, Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, maupun rumah sakit darurat lapangan di beberapa daerah di Indonesia, mendukung pendistribusian APD dan obat-obatan ke berbagai daerah dan mendukung program vaksinasi.
- c. Bidang sosial-ekonomi. TNI membantu pendistribusian bantuan jaring sosial dari Pemerintah ke masyarakat, menyalurkan berbagai bantuan sosial berupa makanan dan sembako, selain itu TNI melakukan *refocusing* atau realokasi anggaran untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19.

Peran TNI dalam penanganan Pandemi Covid-19 telah dilakukan sebelum Covid-19 terdeteksi di Indonesia yakni penjemputan WNI dari Wuhan China dan penyiapan tempat isolasi pertama di Indonesia di pulau Natuna. Selanjutnya melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan dan pengawasan PPKM di masyarakat, penyiapan RS Darurat Covid-19 di Kemayoran dan lainnya hingga vaksinasi yang masih berlanjut saat ini. Sejak pelaksanaan dukungan TNI dalam penanganan pandemi Covid-19 di bulan Maret 2020, TNI secara berkala melakukan evaluasi pelaksanaan secara internal. Dari evaluasi-evaluasi yang

dilakukan oleh Staf Operasi Mabes TNI bersama dengan Staf Operasi Angkatan lainnya (AD, AL, AU) (penulis adalah salah satu pelaku setiap pelaksanaan evaluasi) dan Staf Operasi seluruh Komando Utama (Kotama) TNI di berbagai wilayah, ditemukan beberapa kendala yang dirasa cukup menghambat peran TNI dalam membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan peran TNI dalam penanganan pandemi Covid-19 belum optimal. Beberapa kendala yang ditemukan merupakan permasalahan dari belum optimalnya peran TNI dalam mendukung pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, yaitu: pertama, kurang siapnya sumber daya manusia TNI secara kualitas dan kuantitas; kedua, kurang siapnya sarana prasarana kesehatan TNI; dan ketiga, kurangnya ketersediaan regulasi untuk mendukung tugas TNI dalam membantu menangani bencana non-alam berupa pandemi Covid-19. Kurang siapnya sumber daya manusia TNI berupa terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan sebagai ujung tombak dalam penanganan pasien dan terbatasnya jumlah serta kurang siapnya sumber daya manusia untuk mengawasi penerapan disiplin protokol kesehatan dan PPKM di berbagai tempat. Berikutnya adalah terkait kesiapan dukungan sarana dan prasarana kesehatan TNI, baik kesiapan rumah sakit TNI (AD, AL, AU) serta alutsista TNI berkemampuan sebagai Kapal Rumah Sakit yang jumlahnya sangat terbatas. Selanjutnya terkait regulasi yang masih kurang untuk mendukung tugas TNI dalam membantu mengatasi bencana non-alam berupa bencana kesehatan seperti pandemi Covid-19.

Gelar operasi penegakan protokol kesehatan dan pengawasan penerapan PPKM dilaksanakan oleh TNI dalam 16 organisasi Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) dibawah Komando para Panglima Kodam dengan gelar personil total sebanyak 58.060 tersebar di wilayah 34 Provinsi (Gambar 3). Gelar Operasi tersebut melibatkan unsur-unsur gabungan TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya dengan tugas : penegakan disiplin protokol kesehatan dan pengawasan PPKM di tempat-tempat keramaian masyarakat (terminal, stasiun, pelabuhan penumpang, pasar, mall, tempat wisata dan lainnya) melalui membubarkan kerumunan, melakukan sweeping pasar dan tempat wisata yang melanggar ketentuan protokol kesehatan, menindak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, penyekatan pintu-pintu keluar-masuk wilayah zona merah (terminal, bandara, pelabuhan penumpang), melakukan sosialisasi dan edukasi protokol

kesehatan, dan masih banyak lainnya. Personil TNI yang dikerahkan dalam operasi penegakan protokol kesehatan dan pengawasan penerapan PPKM berasal dari berbagai satuan dari Kotama TNI di kewilayahan dari berbagai kejuruan (korps) diluar kejuruan kesehatan. Akar permasalahan dari personil TNI dalam operasi penegakan protokol kesehatan dan pengawasan penerapan PPKM ini adalah tidak memiliki bekal keilmuan terkait dengan bidang kesehatan dan komunikasi masyarakat, desakan waktu menyebabkan para personil tersebut hanya diberi briefing singkat dan dalam waktu yang singkat tentang tugas yang harus mereka lakukan di lapangan, tentu saja ini tidak cukup sebagai bekal para personil TNI ini dalam menghadapi dinamika-dinamika di lapangan mengingat ragam masyarakat yang sangat majemuk dalam menyikapi kebijakan pengetatan penerapan protokol kesehatan dan PPKM di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga dalam *deployment* personil TNI, dikarenakan desakan waktu personil sejumlah 58.060 orang dengan segera ditugaskan ke tempat-tempat publik, keramaian, dan kerumunan seperti pasar-pasar, mal, terminal, stasiun, pelabuhan umum di seluruh provinsi dan kabupaten dan kota (34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota). Jumlah tersebut masih belum mampu mengcover secara efektif seluruh tempat-tempat pusat keramaian di seluruh provinsi, kabupaten dan kota tersebut diatas, sebagai contoh jumlah pasar rakyat secara nasional menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021 adalah 16.235 (tabel 3), contoh lain yakni jumlah obyek wisata menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021 mencapai 3000 lebih (tabel 4), jumlah tersebut diluar jumlah pusat-pusat keramaian lainnya seperti terminal-terminal bis, stasiun-stasiun kereta, mal-mal, tempat-tempat olahraga dan lainnya.

TNI juga mengerahkan seluruh personil kesehatan dengan berbagai keahlian dan spesialisasi dengan jumlah total 27.163 (Tabel 2) yang tersebar di berbagai Rumah Sakit TNI dan ratusan fasilitas kesehatan tingkat pertama TNI di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dalam dinamika pandemi Covid-19, saat angka terkonfirmasi positif mulai naik, pemerintah merubah fungsi wisma atlet Kemayoran menjadi Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 dan membangun Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang. Kedua Rumah Sakit tersebut pengelolaannya oleh tenaga kesehatan TNI dan dalam pengoperasiannya oleh tenaga kesehatan TNI bersama dengan tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Dari gambaran tersebut, maka akar permasalahan berikutnya terkait permasalahan sumber daya

manusia TNI adalah kurangnya tenaga kesehatan TNI. Sebagai contoh saat angka terkonfirmasi Covid-19 melewati angka 15.000 dan terus naik di bulan Juni 2021 (lihat Gambar 1), angka keterisian Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet mencapai 6.254 pasien (79% dari kapasitas tampung), saat itu pengelola Rumah Sakit mengeluhkan kurangnya tenaga kesehatan yang ada untuk menangani pasien dan untuk mengantisipasi bila jumlah pasien bertambah.²⁹

Di bidang sarana prasana, TNI telah melibatkan seluruh Fasilitas Kesehatan TNI yakni 116 Rumah Sakit dan 656 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama TNI yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Seluruh fasilitas kesehatan TNI tersebut memiliki standar kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat umum. Covid-19 memiliki ciri sangat mudah menular dan menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Dikarenakan kekhasan tersebut ditambah banyaknya penderita yang tertular dibutuhkan tenaga medis serta fasilitas pengobatan khusus penderita infeksi paru-paru dengan jumlah yang banyak. Dari seluruh fasilitas kesehatan TNI yang dimiliki, hanya ada 17 ruangan yang memenuhi spesifikasi sebagai ruang isolasi bertekanan negatif, jumlah tersebut masih jauh dari yang dibutuhkan terutama saat periode tingginya angka terkonfirmasi positif di bulan Juni hingga September 2020 yang mencapai rata-rata 35.000 kasus perhari (Gambar 1). Dari ulasan diatas maka akar permasalahan dari kurang siapnya sarana prasarana TNI dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 adalah kurangnya kemampuan Rumah Sakit TNI dalam menangani pasien Covid-19.

Diawal merebaknya pandemi Covid-19, pelibatan TNI masih bersifat *autopilot* dengan tidak adanya suatu regulasi yang mengikat, belum cukupnya regulasi yang ada terkait pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana non alam seperti pandemi Covid-19 merupakan akar permasalahan selanjutnya terkait dengan regulasi untuk mendukung tugas TNI dalam membantu mengatasi bencana non-alam berupa bencana kesehatan seperti pandemi Covid-19.

Dari pembahasan diatas setidaknya terdapat tiga aspek penting yang perlu menjadi fokus analisis dan bahasan agar peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi dapat lebih optimal. Ketiga aspek tersebut adalah:

²⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/16/15143061/rumah-sakit-darurat-wisma-atlet-masih-kekurangan-tenaga-kesehatan> , diakses 30April2022

- a. Pelibatan SDM TNI.
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana TNI.
- c. Penguatan dan penyiapan regulasi (piranti lunak) untuk mendukung pelibatan TNI.

Ketiga aspek diatas menjadi hal penting untuk dioptimalkan melalui optimalisasi SDM TNI, Sarana Prasarana TNI serta regulasi terkait pelibatan TNI dalam penanganan pandemi agar peran TNI dapat lebih optimal dalam mendukung pemerintah menangani pandemi lainnya di masa mendatang yang sangat mungkin timbul dari mutasi varian *Corona Virus*, mengingat dunia telah mengalami 3 kali pandemi yang disebabkan dari varian virus ini dan berdasarkan sifat virus yang akan selalu bermutasi dari waktu ke waktu.

14. **Penyebab permasalahan belum optimalnya TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi.**

Telah banyak peraturan perundangan dan ketentuan lainnya dari Pemerintah yang mengamanatkan kepada TNI untuk memiliki kemampuan membantu pemerintah menghadapi wabah penyakit, pandemi global, kedaruratan nuklir, biologi dan kimia. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah menaruh harapan besar kepada TNI untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kedaruratan-kedaruratan sebagaimana tersebut diatas tentu saja dalam rangka menjaga ketahanan nasional. Saat pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, TNI telah banyak melakukan perannya, TNI sangat menyadari bahwa pemerintah mengandalkan TNI untuk mengatasi pandemi Covid-19 di negeri ini. Mengingat kejadian pandemi Covid-19 yang begitu cepat maka dalam melakukan perannya tersebut masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh beberapa permasalahan yang ditemukan saat pelaksanaannya dan hal ini menjadi penting untuk dicarikan solusinya agar peran TNI dapat lebih optimal dalam mendukung pemerintah menghadapi pandemi lainnya di masa yang akan datang.

- a. **Kurang siapnya SDM TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19.**

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa salah satu tindakan preventif

dan berkelanjutan dalam penanggulangan bencana diantaranya yakni melakukan pengawasan dan penanganan kesehatan, jika dikaitkan dengan kondisi pandemi, maka pengawasan dan penanganan kesehatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka mengatasi penyebaran wabah yang diakibatkan penularan Covid-19 atau pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga menjadi pedoman bagi BNPB sebagai badan yang mengemban tugas utama penanggulangan bencana dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana serta dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanganan pandemi Covid-19 agar terlaksana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Peran pemerintah saja tidak cukup untuk mewujudkan pengawasan dan penanganan kesehatan sendiri mengingat keterbatasan sumber daya manusia dari Kementerian / Lembaga terkait. Oleh karena itu diperlukan dukungan serta bantuan dari sumber daya manusia lainnya yang memiliki komitmen dalam pengabdian diri kepada negara dan bangsa, salah satunya adalah dari sumber daya manusia yang dimiliki TNI.

Titik sebaran transmisi lokal dan wilayah terkonfirmasi covid-19 telah meliputi hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dari peta penyebaran Covid-19 di Indonesia seperti pada gambar 2 dapat dilihat penyebaran Covid-19 telah terjadi di hampir seluruh kota-kota besar provinsi, kota-kota kabupaten hingga kota-kota kecil di kepulauan Sula, Morowali, Nabire, hingga Keerom di Papua. Luasnya wilayah yang terkonfirmasi ini harus menjadi perhatian Kogasgabbad TNI dalam gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan dan pengetapan penerapan PPKM guna menekan angka penularan. Operasi ini adalah operasi perbantuan kepada pemerintah daerah, tujuan utama operasi penegakan disiplin protokol kesehatan dan pengawasan penerapan PPKM adalah menekan lonjakan kasus penyebaran Covid-19 melalui pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan, patroli penerapan protokol kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin protokol kesehatan di area umum dengan penggunaan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, sedangkan PPKM tujuannya sama yakni mencegah penularan Covid-19 melalui meminimalkan mobilitas masyarakat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan sasaran tempat-

tempat publik serta pusat-pusat kerumunan masyarakat seperti pasar, terminal, bandara, pelabuhan (penumpang), tempat olahraga dan lainnya. Cakupan wilayah dan lokasi-lokasi operasi tersebut diatas sangat luas dan banyak, kondisi tersebut tidak mampu tercover seluruhnya secara efektif oleh personil TNI di wilayah-wilayah dikarenakan terbatasnya jumlah personil.

Disisi lain, dalam upaya penegakan disiplin protokol kesehatan dan penerapan PPKM seringkali prajurit TNI yang melaksanakan tugasnya di lapangan menemui kesulitan dalam mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan PPKM. Tidak sedikit masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan bahkan cenderung mengacuhkan dikarenakan ketidaktahuan akan pentingnya hal tersebut untuk keselamatan jiwa mereka sendiri. Dalam pengawasan penerapan PPKM juga demikian, tidak jarang personil TNI menghadapi masyarakat yang menentang larangan berjualan di tengah melonjaknya angka penularan Covid-19 dikarenakan desakan faktor ekonomi. Menghadapi situasi tersebut dibutuhkan penguasaan tentang “Promosi Kesehatan” dalam menghadapi masyarakat, para personil TNI tidak mempunyai bekal ini dalam melaksanakan tugasnya menegakkan protokol kesehatan dan penerapan PPKM. Promosi kesehatan sendiri adalah suatu ilmu, kombinasi dari ilmu kesehatan masyarakat, komunikasi massa efektif, komunikasi sosial efektif, pemahaman keanekaragaman budaya dan agama. Dengan penguasaan ilmu ini pada prajurit TNI akan sangat menunjang tugas mereka menghadapi masyarakat dalam upaya mewujudkan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat sendiri.

Indonesia menganut sistem pertahanan semesta dalam menghadapi segala ancaman yang akan mengganggu kedaulatan, keamanan, dan keselamatan bangsa. Pandemi Covid-19 dipandang oleh pemerintah sebagai kejadian luar biasa dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia, hal ini dapat dipandang sebagai suatu kondisi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan keselamatan bangsa. Sistem pertahanan semesta merupakan gambaran teori *Total Defence*

dimana dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap negara melibatkan lima aspek pokok kehidupan masyarakat yaitu militer, ekonomi, sosial, dan psikologi, penerapannya di Indonesia dengan melibatkan 3 komponen, yakni komponen militer sebagai komponen utama, komponen non militer yang terdiri dari sipil dan sumber daya alam sebagai komponen cadangan dan pendukung. Secara peraturan dan ketentuan dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah telah menerapkan mekanisme *Total Defence* dengan melibatkan 8 unsur kementerian terkait, TNI, dan Kepolisian. Hanya saja hasil dari pelaksanaan di lapangan sulit untuk dikatakan berhasil. Melalui Keputusan Presiden RI Nomer 7 tahun 2020 dan Keputusan Presiden RI Nomer 9 tahun 2020, pemerintah telah menyatukan 8 Kementerian terkait, TNI, dan Polri dalam Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19 telah membentuk 16 Kogasgabpad untuk kemudahan pengorganisasian dalam pelaksanaan tugas-tugas penanganan pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, TNI melakukannya bersama-sama dengan instansi terkait lainnya, seperti aparat pemerintahan daerah dan Polri. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan dan pengawasan penerapan PPKM dimulai pada April 2020, pada saat itu jumlah kasus terkonfirmasi positif 114 orang, selanjutnya jumlah terkonfirmasi positif terus melonjak, Oktober 2020 = 4.317 orang, Februari 2021 = 10.994 orang, Juli 2021 = 54.517 orang (gambar 1), selama lebih dari 1 tahun pelaksanaan operasi, tepatnya selama 449 hari, perlu diakui tidak berhasil menekan angka penularan Covid-19. Fakta bahwa Indonesia berada di urutan 85 dalam penanganan Covid-19, sedangkan 2 negara tetangga di Asia Tenggara yakni Vietnam dan Taiwan berada dalam urutan 2 dan 3 dalam penanganan Covid-19

Operasi penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan pengawasan penerapan PPKM oleh TNI dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 akan lebih optimal melalui penerapan Manajemen SDM dan Fungsi Dasar Manajemen (POAC). Menurut Prof Dr S Siagian, M.P.A. dalam bukunya "Manajemen Sumber Daya Manusia" (thn 2001) tujuan organisasi akan tercapai dengan baik melalui perencanaan SDM dengan penerapan langkah-

langkah inventarisasi SDM terkait dengan jumlah, kualifikasi kemampuan, pengetahuan dan keterampilan personil. Sedangkan Fungsi Dasar Manajemen (*POAC*) menurut *G.R Terry* adalah proses yang tersusun mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan evaluasi. Dalam merencanakan pengerahan SDM TNI ke Operasi penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan pengawasan penerapan PPKM, hal pertama yang dilakukan adalah memperhitungkan jumlah personil TNI yang ada di Kotama-Kotama, Satuan-satuan TNI di masing-masing wilayah Kogasgabpad dalam hal ini Kodam (gambar 3) dan perhitungan tempat-tempat keramaian di wilayah-wilayah transmisi lokal dan terkonfirmasi (gambar 2), dengan sasaran agar *deployment* personil TNI dapat efisien secara jumlah dan sasaran area operasi serta efektif secara waktu dan tujuan yang diinginkan. Kedua: terkait dengan kualifikasi kemampuan, pengetahuan dan keterampilan personil, maka personil TNI yang notabene adalah kejuruan non kesehatan, diberikan pendidikan dan pelatihan ilmu Promosi Kesehatan yang mencukupi oleh tenaga yang berkompentensi akan hal tersebut sebelum diterjunkan ke lapangan dan berhadapan dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas penegakan protokol kesehatan dan pengawasan penerapan PPKM. Berikutnya adalah menerapkan langkah-langkah Dasar Manajemen (*POAC*) yakni : perencanaan (*Planning*) dengan menentukan secara cermat tugas-tugas apa yang akan dilakukan personil TNI secara perorangan, kelompok, atau area tugas (tergantung hasil survey, penilaian, evaluasi dari kondisi obyek sasaran), menentukan bagaimana cara-cara mereka melakukan tugas-tugas secara detail dan rinci serta tindakan-tindakan kontijensi yang diperlukan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau diluar rencana; berikutnya pengorganisasian (*Organizing*) dengan menyusun organisasi tugas yang jelas secara hirarki meliputi kejelasan tugas, kejelasan wewenang dan tanggung jawab secara perorangan mulai dari level pimpinan, operasional hingga level taktis, kejelasan hubungan antar bagian, kejelasan alur koordinasi dengan satuan-satuan samping (luar TNI), dan kejelasan jaring komunikasi di tiap level sampai dengan ke satuan samping; setelah pengorganisasian langkah penting berikutnya adalah pelaksanaan (*Actuating*) yakni mengimplementasikan perencanaan yang telah dibuat ke

dalam bentuk aksi atau tindakan di lapangan atau medan tugas yang tepat (secara ruang dan waktu); langkah berikutnya yang juga tak kalah penting adalah melakukan pengawasan (*Controlling*) yakni melakukan penilaian, evaluasi, dan melakukan koreksi bila dinilai perlu selama pelaksanaan hingga seluruh tugas dinyatakan selesai.

Tenaga kesehatan TNI juga berperan aktif dalam membantu penanganan pandemi Covid-19. Sebagaimana data yang ada, sejumlah 27.163 tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga-tenaga medis, non medis dan pendukung dari berbagai spesialisasi berbagai penyakit (Tabel 2) yang tersebar di seluruh fasilitas kesehatan TNI mulai dari Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan Tingkat I yang tersebar di berbagai wilayah (gambar 4) hingga laboratorium dan industri Farmasi TNI. Saat meningkatnya jumlah kasus terkonfirmasi mulai pertengahan Maret 2020, pemerintah mengaktifkan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet dan menyedot sebagian tenaga kesehatan TNI untuk mengoperasikan Rumah Sakit tersebut. Dari pertama beroperasi hingga sekarang, kepala Operasional Rumah Sakit tersebut dipimpin oleh seorang Dokter Perwira Menengah TNI. Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet, pemerintah juga membangun Rumah Sakit Khusus Inveksi Covid-19 pulau Galang yang mulai beroperasi pada 6 April 2020 dengan Kepala Operasional Rumah Sakit dijabat oleh seorang Dokter Perwira Menengah TNI, dan pengoperasiannya juga dipercayakan kepada tenaga kesehatan TNI. Kondisi terburuk pandemi Covid-19 terjadi pada medio Juli 2021 dimana angka terkonfirmasi positif perhari saat itu mencapai 54.000 orang. Tingginya angka tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan tenaga medis untuk penanganan pasien Covid-19. Kondisi tenaga medis Indonesia cukup memprihatinkan pada saat itu, jumlah seluruh Dokter yang adalah 106.316 orang (tabel 1). Jumlah tersebut adalah kedua terendah di Asia Tenggara, secara rasio dengan jumlah penduduk Indonesia adalah 0,4 dokter untuk tiap 1000 warga, sama dengan 4 Dokter untuk melayani tiap 10.000 warga, jumlah tersebut berada di bawah standard Organisasi Kesehatan Dunia yaitu 1 Dokter untuk 1000 warga pada satu daerah. Demikian halnya dengan tenaga kesehatan Indonesia, rasio perawat di

Indonesia belum memadai, yakni 2 perawat untuk melayani 1000 warga Indonesia.

Kondisi keterbatasan tersebut diatas dapat lebih dioptimalkan dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 dengan menerapkan sinergitas. Menurut Najiyati dan Rahmat (2011), sinergi didefinisikan sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Berdasarkan konsep sinergitas maka bentuk dari sinergitas yang dapat diimplementasikan pada pelibatan tenaga kesehatan TNI untuk mendukung pemerintah menangani pandemi bersama dengan tenaga kesehatan umum yang ada adalah dalam bentuk koordinasi antara stakeholder terkait tenaga kesehatan umum di Indonesia yang meliputi pemerintah, TNI dan swasta atau non pemerintah, baik dalam sifat hubungan vertikal, hubungan horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan serta komunikasi yang intensif untuk mempermudah pertukaran informasi, dengan demikian keterbatasan yang ada dapat lebih dioptimalkan pemberdayaannya dalam penanganan pandemi Covid-19.

b. Terbatasnya kemampuan sarana prasarana TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 adalah kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, penyebarannya yang sangat cepat mengakibatkan jumlah pasien terpapar dan kapasitas sarana prasarana kesehatan menjadi tidak seimbang dan timpang. Beberapa sarana dan prasarana pendukung penanggulangan pandemi di Indonesia saat ini adalah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Rumah sakit yang mempunyai fasilitas rawat inap untuk pasien penyakit pandemi masih belum memadai. Di salah satu media memberitakan, Kementerian Kesehatan saat itu mengakui bahwa sistem pelayanan kesehatan umum di Indonesia kondisinya terbatas dan kurang memadai. Kondisi keterbatasan ini diperburuk dengan meningkatnya jumlah pasien akibat pandemi yang menyebabkan kapasitas rumah sakit rujukan semakin overload karena banyaknya pasien. Di masa awal pandemi, dua

rumah sakit darurat yang disiapkan oleh Pemerintah, yaitu RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran dengan daya tampung mencapai 24.000 orang pasien dan RS Khusus Infeksi Covid-19 Pulau Galang dengan daya tampung 1.000 orang pasien. Namun demikian, jumlah ini belum cukup ketika dihadapkan dengan lonjakan jumlah pasien saat masifnya penularan virus ini pada periode Juni hingga September 2020 (gambar 1).

Terkait dengan kebutuhan fasilitas kesehatan pada masa penanganan pandemi Covid-19, TNI memberdayakan seluruh fasilitas kesehatan yang dimiliki, yakni 116 Rumah Sakit, 656 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama TNI yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia (gambar 4), 2 buah Kapal Rumah Sakit. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan TNI tersebut memiliki standar kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat umum. Infeksi virus Covid-19 memiliki ciri sangat mudah menular dan menimbulkan infeksi berat pada saluran pernafasan seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Ciri penularan dan infeksi yang ditimbulkan pada penderita Covid-19 ini membutuhkan kekhususan dalam penanganannya. Untuk penanganan dan perawatan pasien Covid-19 selain obat-obatan dibutuhkan ruangan isolasi khusus bertekanan negatif dan sejumlah peralatan maupun perlengkapan perawatan yang khusus dalam jumlah yang banyak seperti ventilator, oksigen dan lainnya. Dari seluruh rumah sakit yang dimiliki TNI termasuk 2 Kapal Rumah Sakit hanya tersedia 17 ruangan yang memenuhi spesifikasi ruang isolasi bertekanan negatif. Dari data yang ada saat itu, kondisi yang dibutuhkan untuk HCU penderita positif adalah sejumlah 563 ruangan, untuk ICU terkonfirmasi positif dari seluruh rumah sakit yang ada adalah sejumlah 252 ruangan serta ruang pasien suspect adalah sejumlah 1022 ruangan, sehingga yang masih dibutuhkan secara keseluruhan adalah 1648 ruangan.

Disamping rumah sakit, keberadaan fasilitas kesehatan lainnya berupa laboratorium yang menjadi rujukan nasional menjadi penting dalam upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19. Laboratorium dibutuhkan untuk penguatan pemeriksaan spesimen Covid-19 sejak ditetapkan sebagai bencana non-alam. Di masa awal pandemi, Kementerian Kesehatan telah menetapkan beberapa laboratorium yang dimiliki oleh K/L, TNI-Polri dan

Swasta untuk melaksanakan pemeriksaan spesimen virus Corona. Sebagai contoh, pada Tabel 5 disajikan data penggunaan laboratorium rujukan milik K/L, TNI-Polri dan swasta yang dilibatkan dalam penanganan pada masa awal pandemi.

LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL		
No	Institusi/ Lembaga	Jumlah
1	Kementerian Kesehatan	29
2	Kemendikbud	34
3	Kementerian Pertanian	9
4	Kemenristek/ BRIN	4
5	Kementerian Agama	2
6	BIN	4
7	BPPT	1
8	Gugas Covid-19	2
9	TNI	6
10	Polri	3
11	Pemda	97
12	Badan POM	8
13	BUMN	20
14	Yayasan Korpri	1
15	ARSSI (Swasta)	23
16	Relawan	1

Tabel 5 Daftar Laboratorium Rujukan Nasional
 Sumber: Gugus Tugas Nasional, Optimalisasi Penanggulangan
 Bencana Alam dan Non-alam, 2020

Dari data yang tersaji dalam tabel tersebut di atas, terdapat sejumlah laboratorium yang menjadi laboratorium rujukan pemerintah. Sebanyak 244 laboratorium telah dipersiapkan untuk menguji spesimen milik pasien Covid-19 maupun terduga Covid-19 di seluruh Indonesia. Namun dihadapkan dengan luasnya wilayah sebaran transmisi lokal dan wilayah yang terkonfirmasi (gambar 2) maka untuk mempercepat pengujian spesimen tentu diperlukan laboratorium yang lebih banyak dari jumlah tersebut.

Mengacu pada teori *Total Defence*, semua lembaga pemerintah yang relevan, termasuk seluruh masyarakat harus bersatu untuk menghadapi ancaman dan tantangan secara efektif. Konsep ini melibatkan lima aspek pokok dalam kehidupan masyarakat, antara lain militer, ekonomi, sipil, sosial, dan psikologi. Di Indonesia, teori *Total Defence* dikenal sebagai Pertahanan Rakyat Semesta, dengan dasar bahwa perlawanan rakyat (baik perlawanan

bersenjata maupun tanpa senjata) dengan asas tidak kenal menyerah. Mengingat Pandemi dianggap sebagai ancaman nyata yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan bangsa maka harus dihadapi secara total dan terpadu oleh seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu dukungan dan pemberdayaan seluruh sarana prasarana kesehatan yang ada dari berbagai pihak, seperti industri farmasi, industri vaksin, industri peralatan medis, industri alat pelindung diri, termasuk fasilitas layanan kesehatan baik dari pemerintah dan swasta menjadi suatu keniscayaan untuk disinergikan agar kemampuan dalam penanganan pandemi Covid-19 lebih optimal.

Sinergi menurut Najiyati dan Rahmat (2011) adalah suatu gabungan yang mampu menghasilkan keluaran yang lebih baik melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Dikaitkan dengan kondisi sarana prasarana bidang kesehatan diatas untuk menghadapi pandemi adalah dengan sinergitas antara elemen-elemen mulai dari pemerintah d.h.i Kementerian terkait, TNI, Polri, non pemerintah / swasta melalui dua hal yakni komunikasi dan koordinasi. Terkait dengan peran dukungan sarana prasarana TNI, maka hal pertama yang perlu untuk TNI lakukan adalah mewujudkan komunikasi yang efektif dengan memberikan informasi menyeluruh tentang sarana prasarana kesehatan TNI kepada Kementerian dan swasta yang terkait, dari sini diharapkan Kementerian dan swasta yang terkait akan memberikan informasi yang sama yang telah diberikan oleh TNI, dengan demikian akan ada pertukaran informasi menjadi suatu informasi atau data yang komprehensif tentang situasi sarana prasarana kesehatan secara keseluruhan. Informasi atau data tersebut adalah hal penting untuk pengendalian pemanfaatan sarana prasarana kesehatan yang efektif dalam penanganan pandemi. Hal kedua yang perlu dilakukan TNI adalah koordinasi dengan pemerintah dan swasta yang terkait sarana prasarana bidang kesehatan untuk pengendalian pemanfaatan sarana prasarana kesehatan TNI dalam penanganan pandemi sehingga penggunaan sarana prasarana kesehatan TNI dapat lebih efektif dan lebih efisien dalam penanganan penderita infeksi Covid-19.

c. Kurangya regulasi untuk mendukung peran TNI dalam membantu pemerintah menangani pandemi.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana, disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian, pemerintah membentuk BNPB yang berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Selain itu, dijelaskan pula hak dan kewajiban masyarakat. Setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk ikut andil dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Pada regulasi lain, yakni Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dimuat ketentuan yang mengatur upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, dimana upaya tersebut membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat dan kerjasama internasional.

Sejak pandemi (Covid-19) diputuskan oleh pemerintah sebagai situasi darurat terhadap kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hingga saat ini penularan Covid-19 masih berlangsung, bahkan WHO menghimbau agar masyarakat jangan dulu beranggapan saat ini penularan Covid-19 mereda dan menuju endemi, belum ada satupun pihak yang bisa memastikan secara pasti kapan ini akan berakhir. Pemerintah Indonesia telah mencoba bertindak sigap dengan mengambil berbagai kebijakan dan langkah untuk melakukan penanganan. Sebagai langkah awal penanganan Pandemi Pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan keprotokolan khusus untuk penanggulangan penyebaran wabah ditengah tengah masyarakat. Pemerintah mengambil langkah *extra ordinary*, bukan tindakan yang bersifat *business as usual*, dikarenakan pelaksanaannya belum dapat diakomodasi

oleh peraturan perundangan yang ada. Kebijakan strategis yang diambil Pemerintah adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan aturan tersebut Pemda dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, maka dapat dipersepsikan bahwa pencegahan penyebaran penyakit menular yang tengah menjadi pandemi dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan, tugas dan tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Karena pandemi yang datang begitu tiba-tiba, belum banyak peraturan yang mengatur bagaimana penanganan teknis secara detail di lapangan. Pada Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, diatur tugas, fungsi dan peran TNI dalam pembangunan nasional. Dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan tugas TNI dalam rangka OMSP, disebutkan bahwa terdapat dua hal yang dapat dijadikan dasar bagi TNI untuk ikut membantu pemerintah dalam penanganan pandemi, yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah dan membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Sayangnya belum ada aturan pelaksanaan berupa Perpres atau Permen yang mengatur lebih teknis bagaimana pelibatan TNI dalam melaksanakan tugas tersebut. Kendala yang ditemukan oleh TNI dalam perbantuan penanganan pandemi adalah terkait regulasi. Pelibatan TNI saat itu masih bersifat autopilot dengan tidak ada suatu regulasi yang mengikat. Pada waktu awal munculnya pandemi, undang-undang karantina kesehatan menjadi dasar pelaksanaan tugas, namun belum ada aturan pelaksanaan yang menjadi panduan teknis bagi TNI untuk melakukan perbantuan penanganan pandemi.

Terkait dengan dukungan TNI membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, di TNI ada Doktrin OMSP (Kep Panglima TNI Nomer Kep/713/VII/2019 tgl 10 Juli 2019) yang merupakan turunan dari

Doktrin TNI. Kedudukan Doktrin OMSP ini berada di tataran doktrin fungsi, masih harus diturunkan lagi menjadi Petunjuk Penyelenggaraan tentang tugas-tugas dalam penanggulangan bencana non-alam untuk level operasional, dari level ini harus diturunkan lagi menjadi Petunjuk Teknis sebagai pedoman pelaksanaan untuk level taktis. Saat ini kedua pedoman tersebut diatas yaitu Petunjuk Penyelenggaraan tentang tugas-tugas dalam penanggulangan bencana non-alam dan Petunjuk Teknis terkait belum ada.

Kejadian pandemi lainnya di masa yang akan datang merupakan keniscayaan, hal ini merupakan sebuah ancaman nyata yang bisa timbul kapan saja. Pokok persoalan bidang penegakan kedisiplinan protokol kesehatan masyarakat pada konteks penanganan pandemi adalah perilaku menjaga jarak fisik dimana saat ini relatif sulit untuk diterapkan dibandingkan protokol memakai masker dan mencuci tangan. Masyarakat Indonesia cenderung suka berkumpul dan dalam beberapa kesempatan kerumunan tidak bisa terhindarkan, seperti dalam angkutan umum ataupun saat antre. Masih banyak ditemukan pelanggaran di tengah masyarakat berupa ketidakpatuhan menggunakan masker dengan benar, belum dipatuhinya aturan jam operasional ruang publik secara maksimal dan sanksi pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan belum dapat memberikan efek jera. Dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwasanya peran TNI belum optimal karena belum adanya SOP dan doktrin dalam penegakan kedisiplinan protokol kesehatan masyarakat dalam penanganan pandemi.

Dari bahasan diatas dapat diperoleh gambaran bahwa dari ketiga permasalahan terkait peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19 dalam hal ini permasalahan pelibatan SDM TNI, pemanfaatan sarana dan prasarana TNI, dan masih lemahnya regulasi terkait pelibatan TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi (Covid-19), lebih disebabkan karena situasi pandemi Covid-19 yang begitu tiba-tiba sehingga segala upaya untuk penanggulangannya dilakukan dengan secepat-cepatnya. Dari apa yang telah dilakukan TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19 masih ada hal-hal yang dapat dilakukan agar peran TNI mendukung pemerintah menangani pandemi di masa yang akan datang dapat lebih optimal.

15. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.

Hal penting dalam mengoptimalkan peran TNI guna membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi penyakit menular adalah optimalnya kekuatan TNI dan pemerintah dalam bekerja sama, berkoordinasi serta berkomunikasi untuk kepentingan percepatan penanganan pandemi penyakit menular. Berdasarkan dengan kondisi saat ini dimana pandemi penyakit menular (Covid-19) sedang berlangsung, dihadapkan pada fakta bahwa virus berkembang biak melalui mutasi maka sangat mungkin timbul pandemi dari varian virus Corona di masa mendatang. Oleh karena itu diharapkan peran TNI dapat lebih optimal sehingga dikemudian hari tantangan pandemi penyakit menular dapat diatasi lebih cepat.

Mengacu pada teori analisis SWOT, sebelum melaksanakan analisis, terlebih dahulu perlu digali dan dilaksanakan pengenalan terhadap berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi (eksternal dan internal) untuk dinilai lebih lanjut guna merumuskan strategi yang paling tepat. Analisis SWOT didasarkan pada cara berpikir lurus yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Hhadapkan pada kondisi tersebut, maka diperlukan adanya kemampuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor eksternal dan faktor internal.

a. Faktor Eksternal. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi analisis pemecahan masalah pelibatan TNI guna membantu pemerintah menangani pandemi dalam rangka menjaga ketahanan nasional, adalah sebagai berikut:

- 1) Sejak diumumkan menjadi pandemi oleh WHO, tumbuh kesadaran masyarakat global akan pentingnya kerja sama multilateral terkait penelitian untuk obat dan vaksin dalam penanganan pandemi
- 2) Untuk mengatasi pandemi penyakit menular, Presiden RI membentuk satgas yang mampu menyinergikan dan memberdayakan lembaga dan institusi yang dilibatkan dalam penanganan pandemi. Harapannya semua komponen bangsa secara bersama sama baik langsung maupun tidak langsung turun berperan serta mempercepat upaya mengatasi pandemi yang merupakan musuh bersama saat ini.

- 3) Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia kaya akan sumber daya alam hayati berupa tumbuhan yang dapat dijadikan bahan baku obat atau herbal buatan Indonesia yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 4) Di berbagai daerah banyak bermunculan gerakan masyarakat dalam rangka penanganan pandemi. Inisiatif dan inovasi dari masyarakat tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah agar penanganan pandemi sejalan dengan kebijakan yang disusun.
- 5) WHO telah menerbitkan standarisasi penanganan pandemi yang selanjutnya diadopsi oleh Kementerian Kesehatan untuk menerbitkan pedoman yang dijadikan acuan bagi petugas kesehatan dalam penanganan penularan virus corona.
- 6) Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga survei, diperoleh hasil bahwa secara kelembagaan, masyarakat cukup percaya dengan lembaga TNI. Kondisi ini menjadi peluang untuk melibatkan TNI dalam percepatan penanganan pandemi karena kehadirannya di tengah masyarakat akan lebih mudah diterima.
- 7) Arus globalisasi pada era industri 4.0 membawa pengaruh kuat terhadap kemajuan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana. Banyak bermunculan aplikasi yang dibangun dengan pondasi *internet of things* (IOT) yang merupakan hasil kemajuan iptek yang sangat mempermudah petugas di lapangan untuk mengumpulkan hingga memvalidasi data.
- 8) Dalam beberapa kegiatan penanganan dampak pandemi, baik pada lingkup pusat hingga di daerah, pemerintah menyambut baik keterlibatan prajurit TNI di lapangan, dengan bekerjasama menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Demikian juga halnya dengan masyarakat yang antusias terhadap keterlibatan prajurit TNI dalam penanganan bencana. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan kehadiran TNI.
- 9) Tingginya jumlah pasien yang terpapar virus corona sehingga harus mendapat perawatan medis di RS mengakibatkan terjadinya

kelelahan petugas medis yang berdampak pada banyaknya dokter dan tenaga kesehatan yang turut terinfeksi dan gugur saat bertugas.

10) Dinamika perubahan aturan dan kebijakan dalam penanggulangan pandemi penyakit menular yang sangat dinamis dan cepat, mengakibatkan terjadinya kelelahan masyarakat untuk menyikapi perubahan-perubahan tersebut yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan menurunnya kesadaran masyarakat akan disiplin protokol kesehatan.

11) Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Jika ditinjau dari faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan maka kondisi ini memberikan tantangan tersendiri dalam upaya penanganan pandemi terutama dalam hal sebaran pulau-pulau dan daerah terpencil.

12) Banyaknya berita hoax yang beredar di media sosial memberi citra negatif dan mengakibatkan timbulnya miss informasi kepada masyarakat. Penyebaran berita hoaks berdampak pada menurunnya kedisiplinan masyarakat akan protokol kesehatan.

13) Ditengah banyaknya masyarakat yang peduli dan aktif membantu pemerintah mengatasi dampak pandemi, masih ada oknum masyarakat yang acuh atau tidak peduli. Hal ini dapat mempengaruhi kesadaran pribadi dalam menjaga protokol kesehatan sehingga akan berdampak pada munculnya kendala dalam penegakkan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat.

14) Pandemi penyakit menular telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Pusat. Beberapa regulasi dan kebijakan telah diterbitkan sebagai pedoman dalam pencegahan dan penanggulangan dampak Pandemi. Namun demikian masih ditemukan adanya perbedaan dalam implementasi di daerah yang mengakibatkan tidak sinkronnya pelaksanaan penanganan di lapangan.

15) Pemerintah menghindari *lockdown* dan mengambil kebijakan PSBB untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Beberapa

pengusaha mengambil keputusan untuk mengurangi aktifitas usaha mereka bahkan ada juga yang menghentikannya dan merumahkan sebagian karyawan. Kondisi ini berpengaruh pada sosial ekonomi beberapa lapisan masyarakat yang turun akibat meningkatnya PHK.

16) Undang-undang RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang Undang RI No 34 tahun 2004 tentang TNI merupakan payung hukum bagi TNI dalam melaksanakan OMSP, namun sampai saat ini undang undang tersebut masih belum dijabarkan dalam aturan pelaksanaan sehingga menimbulkan keraguan dalam mengimplementasikan tugas tugas OMSP.

b. Faktor Internal.

1) Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai keadaan darurat bencana non-alam yang termasuk ke dalam bencana nasional yang membutuhkan penanganan secara berkelanjutan dan komprehensif serta terintegrasi dengan melibatkan peran serta TNI. TNI memandang pandemi adalah ancaman nyata bagi pertahanan negara. TNI berkomitmen untuk membantu pemerintah mengatasi dampak pandemi dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

2) Berdasarkan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam Bab II, Pasal 2 disebutkan bahwa jati diri TNI adalah: Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik.³⁰

3) Peran TNI-Polri dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional difokuskan pada tiga hal yaitu penegakan disiplin

³⁰ Setneg, UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Bab II tentang Jati Diri TNI

protokol kesehatan masyarakat, melaksanakan pengawasan dan penanganan kesehatan, serta menjaga stabilitas dan pembangunan ekonomi.

4) Dalam perspektif pertahanan negara yang diselenggarakan secara semesta, kerjasama seluruh komponen masyarakat yang mencakup peran pemerintah, militer dan sipil dibutuhkan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman termasuk ancaman non-militer yang berwujud bencana nonalam salah satunya pandemi Covid-19. Dalam penjelasan definisi pertahanan negara, seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta yang dikembangkan dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut.³¹

5) Satuan satuan TNI tergelar di seluruh wilayah Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah dengan adanya Komando Kewilayahan bahkan sampai ke pedesaan yaitu adanya Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga. Pelibatan TNI untuk mendisiplinkan warga di masa pandemi didasarkan pada sumber daya yang dimiliki sampai ke tingkat desa. Hal ini dilakukan dikarenakan TNI memiliki sumber daya manusia, infrastruktur, jaringan sampai ke desa-desa, serta dalam rangka semata-mata membantu aparat sipil dalam menangani pandemi dalam soal pendisiplinan. Selain itu, situasi pandemi sudah dalam kondisi luar biasa sehingga perlu pendisiplinan yang ketat untuk menekan laju kasus positif pasien yang terdampak pandemi

6) Pembinaan Teritorial TNI memiliki peran sebagai salah satu kegiatan utama dalam pemberdayaan wilayah pertahanan untuk

³¹ Kemhan, Buku Putih Pertahanan, 2015

mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Fungsi pembinaan teritorial TNI diarahkan agar dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi nasional melalui Pembinaan Kemampuan Teritorial, Perlawanan Wilayah, Komunikasi Sosial, dan Bakti TNI. Dalam dimensi penanganan pandemi peran pembinaan teritorial TNI mencakup aspek keamanan dan ketertiban dalam penanganan pandemi.

7) Secara umum dapat dikatakan jumlah personel TNI cukup memadai dengan didukung struktur organisasi yang tergelar sampai tingkat desa dengan sistem komando tunggal merupakan sebuah kekuatan yang dapat dikelola dalam percepatan penanganan pandemi, namun secara spesifik tenaga kesehatan yang ada masih terbatas.

8) Tersedianya alutsista TNI seperti kapal angkut, kapal tanker, pesawat terbang angkut yang siap digerakkan kapan saja serta adanya unsur-unsur yang sedang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan menjadi saran pendukung dalam percepatan penanganan pandemi.

9) Undang-undang RI No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang Undang RI No 34 tahun 2004 tentang TNI merupakan payung hukum bagi TNI dalam melaksanakan OMSP, namun hingga kini undang-undang tersebut belum dijabarkan dalam bentuk aturan pelaksanaan sehingga menimbulkan keragu-raguan bagi TNI dalam mengimplementasikan tugas-tugas OMSP.

10) Belum adanya peranti lunak berupa Doktrin maupun SOP yang mendefinisikan peran TNI secara rinci dalam mekanisme penanganan bencana non-alam.

11) Meningkatnya jumlah pasien yang terinfeksi virus corona mengakibatkan RS dan ruang ICU untuk menangani pasien terdampak pandemi penyakit menular menjadi penuh bahkan banyak pasien yang tidak tertampung di ruang perawatan, sehingga TNI membangun banyak RS lapangan.

12) Belum adanya anggaran khusus dalam percepatan penanganan pandemi penyakit menular, anggaran yang digunakan adalah hasil *refocussing* dari kegiatan lain.

13) Minimnya pemanfaatan Litbang TNI dalam penanganan pandemi penyakit menular. Litbang saat ini lebih banyak berperan memberikan hasil penelitian dalam rangka pembangunan dan pengembangan alutsista.

14) Sumber daya manusia TNI yang memiliki kemampuan Nubika sangat terbatas. Dengan adanya percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, kedepannya ancaman nubika dalam perang asimetrik berpeluang menjadi ancaman serius yang membutuhkan kompetensi prajurit terlatih untuk mengatasinya.

15) Sejak jaman kemerdekaan, TNI sudah di perkuat dengan alutsista yang cukup mumpuni. Sebagian besar alat utama yang dimiliki TNI saat itu hingga saat ini masih dapat beroperasi meski usianya tidak lagi muda. Dengan kondisi tersebut, TNI tetap berupaya melaksanakan tugas, meskipun hasil capaiannya kurang optimal.

16) Pandemi penyakit menular merupakan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya sehingga ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan belum dipersiapkan secara dini. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: terbatasnya jumlah rumah sakit rujukan dan penyebarannya yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. TNI turut mengerahkan semua Sarana dan Prasarana kesehatan berupa RS TNI, kapal rumah sakit hingga RS lapangan, namun jumlahnya belum mencukupi

16. Solusi Optimalisasi Peran TNI Dalam Mendukung Pemerintah Menangani Pandemi.

Dalam rangka mendukung pemerintah menangani pandemi penyakit menular yang saat ini sedang menjadi fokus perhatian bersama, dan kemungkinan besar di kemudian hari akan kembali terjadi dalam bentuk dan varian yang berbeda, maka perlu disusun strategi dan upaya untuk mengoptimalkan peran TNI dalam mendukung pemerintah mempercepat penanganan dampak dari pandemi.

a. Strategi.

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis, diskusi, wawancara dan pengumpulan hasil kuisioner dari 15 orang ekspert sebagai narasumber yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi Covid-19, serta berdasarkan pemetaan hasil identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi di dukung dengan teori analisis SWOT, maka dapat dijabarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang berupa kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) ke dalam tabel faktor internal dan eksternal sesuai Tabel 6 (Faktor Internal) dan Tabel 7 (Faktor Eksternal) sebagai berikut:

KEKUATAN (STRENGHT)	
S1	Komitmen kuat dari TNI untuk membantu pemerintah menangani pandemi.
S2	Jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional
S3	Kekuatan jumlah sumber daya manusia (aparatus) untuk menangani pandemi
S4	Keterlibatan seluruh komponen bangsa sebagai bagian dari strategi pertahanan semesta baik aparat sipil, TNI-Polri, dan komponen masyarakat
S5	Kekuatan TNI tergelar dari pusat hingga ke daerah di seluruh Indonesia
S6	Fungsi pembinaan teritorial TNI terlaksana dengan baik
S7	Jumlah personel TNI – Polri yang memadai dan struktur yang tergelar sampai tingkat desa dengan sistem komando tunggal dalam percepatan penanganan pandemi
S8	Tersedianya alutsista TNI seperti kapal angkut, kapal tanker, pesawat terbang angkut yang siap digerakkan kapan saja serta adanya unsur-unsur yang sedang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia
KELEMAHAN (WEAKNESS)	
W1	Undang-undang RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai payung hukum dalam melaksanakan OMSD sampai saat ini masih belum dijabarkan dalam aturan pelaksanaan
W2	Belum adanya peranti lunak yang mendefinisikan peran TNI dalam mekanisme penanganan bencana non-alam
W3	Semakin terbatasnya kapasitas RS dan ruang ICU untuk menangani pasien terdampak pandemi penyakit menular
W4	Belum adanya anggaran khusus dalam percepatan penanganan pandemi penyakit menular anggaran yang digunakan adalah hasil refocussing dari kegiatan lain
W5	Minimnya pemanfaatan Litbang TNI dalam menganalisa ancaman pandemi.
W6	Sumber Daya Manusia TNI yang memiliki kemampuan Nubika (Nuklir, biologi, kimia) terbatas
W7	Sebagian besar alat utama yang dimiliki TNI kondisinya sudah tua, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas
W8	Sarana dan Prasarana kesehatan yang dimiliki TNI belum memadai mengatasi pandemi penyakit menular

Tabel 6 Faktor Internal

Sumber: diolah kembali oleh penulis

PELUANG (OPORTUNITY)	
O1	Adanya kesadaran global akan kerja sama multilateral dalam penelitian untuk obat dan vaksin dalam rangka penanganan pandemi.
O2	Peran Presiden Republik Indonesia dalam membentuk satuan tugas-satuan tugas yang mampu menyinergikan dan memberdayakan lembaga dan Institusi yang dilibatkan dalam penanganan pandemi
O3	Kekayaan sumber daya alam Indonesia seperti rempah obat atau herbal buatan Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
O4	Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penanganan Pandemi dan pemulihan ekonomi
O5	Adanya standarisasi penanganan pandemi (Covid-19) oleh WHO.
O6	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI sangat tinggi.
O7	Arus globalisasi membawa pengaruh kuat terhadap kemajuan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana
O8	Adanya dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana
KENDALA (THREATS)	
T1	Jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang terinfeksi penyakit yang menjadi pandemi dan gugur masih terus terjadi.
T2	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan menurunnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan
T3	Faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan memberikan kendala tersendiri dalam upaya penanganan pandemi terutama dalam hal sebaran pulau pulau dan daerah terpencil.
T4	Penyebaran berita hoaks yang menyebabkan menurunnya kedisiplinan masyarakat akan protokol kesehatan.
T5	Keacuhan atau ketidakpedulian beberapa orang dalam masyarakat tentang pencegahan pandemi
T6	Kurangnya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam penanganan Pandemi
T7	Kondisi sosial ekonomi beberapa lapisan masyarakat yang turun akibat meningkatnya PHK
T8	Belum adanya peranti lunak yang mendefinisikan mekanisme pelaksanaan kerja sama Sipil-militer yang mengancam pertahanan-keamanan nasional.

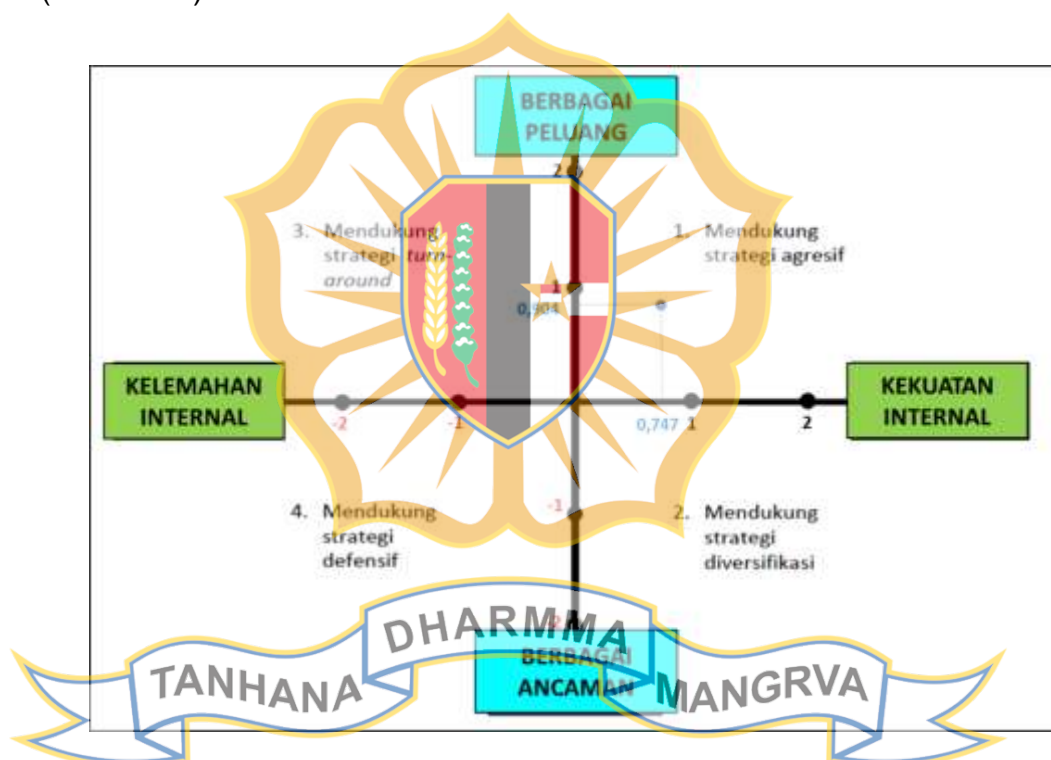
Tabel 7 Faktor Eksternal

Sumber: diolah kembali oleh penulis

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang di dapat, kemudian dimasukkan ke dalam tabel *Internal Factor Analysis Strategic* (IFAS) dan *External Factor Analysis Strategic* (EFAS), di mana sebelumnya dilakukan pembobotan terhadap masing-masing faktor-faktor tersebut. Pada penelitian ini, pembobotan dan rating dilakukan oleh 15 orang narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dalam pelaksanaan penanganan penyakit pandemi. Pembobotan dan *rating* berfungsi untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang dapat memberikan dampak positif atau negatif. Dampak positif dapat dijadikan faktor kekuatan dan peluang, sementara dampak negatif dapat dijadikan kelemahan dan

ancaman. Selanjutnya dari hasil penentuan nilai bobot dan *rating* pada faktor-faktor internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh narasumber, langkah berikutnya adalah melaksanakan penghitungan terhadap nilai bobot dan *rating*, sebagaimana tercatat pada Tabel 8 Penghitungan Bobot IFAS, Tabel 9 Penghitungan Bobot EFAS, Tabel 10 Penghitungan Rating IFAS, dan Tabel 11 Penghitungan Rating EFAS. (Lihat lampiran II).

Merujuk pada data yang tertuang di Tabel 12 Hasil Penghitungan Bobot dan Rating IFAS dan Tabel 13 Hasil Penghitungan Bobot dan Rating EFAS (Lihat Lampiran II), maka diperoleh selisih nilai IFAS: **0,747** dan selisih nilai EFAS: **0,904** yang selanjutnya digambarkan pada kuadran SWOT (Gambar 6).



Gambar 6 Kuadran SWOT, Posisi Strategi Optimalisasi Peran TNI Dalam Mendukung Pemerintah Menangani Pandemi
Sumber : diolah kembali oleh penulis

Dari hasil penentuan kuadran pada Gambar 6 dapat diketahui bahwa posisi Strategi Optimalisasi peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi guna ketahanan nasional berada pada kuadran I, yang dapat diinterpretasikan bahwa pelibatan TNI dalam membantu pemerintah memiliki kekuatan yang baik didukung dengan peluang yang ada dari eksternal dalam menghadapi ancaman yang nyata yaitu pandemi. Strategi

yang dapat di implementasikan dalam situasi ini adalah mendukung strategi agresif. Jika kita amati kuadran dari hasil perhitungan matriks SWOT, meski menghadapi banyak tantangan akibat pandemi, TNI masih memiliki kekuatan dari sisi internal. Adapun strategi yang dapat di implementasikan adalah strategi agresif, yakni memanfaatkan kekuatan yang ada untuk memaksimalkan peluang yang telah diidentifikasi. Posisi kuadran sebagaimana tergambar di atas selanjutnya dapat dijabarkan dalam formulasi strategi sebagai berikut:

- 1) Strategi 1. Mengoptimalkan Sumber daya manusia TNI secara kuantitas dan kualitas dengan mencetak SDM yang unggul di bidang kesehatan, komunikasi sosial, dan kemampuan teritorial, melalui rekrutmen serta pelatihan-pelatihan baik secara perorangan maupun kelompok, berkolaborasi dengan lembaga pendidikan di dalam maupun di luar negeri, agar siap untuk dilibatkan guna membantu pemerintah mengatasi pandemi.
- 2) Strategi 2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana TNI melalui peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan TNI dan pemenuhan kebutuhan alutsista TNI agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan dukungan kesehatan secara optimal serta senantiasa siap setiap saat digerakkan untuk melaksanakan perbantuan kepada pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana termasuk kesiapsiagaan dalam hal penanganan wabah pandemi.
- 3) Strategi 3. Melaksanakan penguatan dan penyiapan piranti lunak melalui penyusunan mekanisme kerjasama sipil-militer dalam penanggulangan bencana dan merealisasikan piranti lunak mekanisme peran TNI dalam penanganan bencana non-alam sebagai pedoman yang lebih spesifik untuk mendukung pelibatan TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi penyakit menular.

b. Upaya-upaya.

Strategi yang telah dirumuskan di atas perlu diwujudkan dalam upaya-upaya nyata sebagai mengimplementasi dari hasil analisis pemecahan masalah yang sudah ditelaah secara mendalam. Upaya-upaya untuk

pemecahan masalah terkait belum optimalnya peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi guna menjaga ketahanan nasional antara lain:

- 1) Upaya dalam mewujudkan Strategi 1.
 - a) Mencetak SDM TNI yang unggul di bidang kesehatan, terutama ahli epidemiologi, laboratorium, virology, farmakologi, *bio defence*, *bio security*, *bio safety* dan ahli dalam bidang nuklir.
 - b) Menyiapkan Komponen Cadangan bidang kesehatan yang dilatih dan dibekali dengan keterampilan khusus agar mampu dan siap untuk diterjunkan membantu pemerintah menangani pandemi penyakit menular yang sangat mungkin terjadi kembali di masa yang akan datang.
 - c) Melaksanakan transformasi dalam bidang pendidikan khususnya di jenjang perguruan tinggi (Unhan) dengan mendirikan Fakultas Teknik Militer, Fakultas Farmasi Militer, Fakultas Kedokteran Militer, dan Fakultas Psikologi Militer.
 - d) melaksanakan peningkatan *capacity building* bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi dengan kemampuan mengatasi ancaman non militer untuk mengantisipasi disruptif atau pergeseran norma dalam sistem sosial yang dapat mengancam pertahanan negara di masa yang akan datang.
 - e) Melaksanakan peningkatan kemampuan organisasi, sistem dan tata kerja satuan-satuan TNI khususnya yang berada di daerah guna mengantisipasi dinamika tantangan kedepan yang terkait dengan ancaman nuklir. Pembinaan personel TNI pada prinsipnya diarahkan untuk menghadapi dinamika ancaman yang akan datang.
 - f) Memberikan bekal pemahaman, pengetahuan, wawasan yang benar kepada setiap personel TNI tentang pandemi penyakit menular berdasarkan standard yang telah ditetapkan pemerintah atau organisasi kesehatan dunia (WHO)

dan menjadikannya sebagai agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi contoh baik dalam bersikap dan bertindak dalam norma berkebiasaan baru (*new normal*) sebagai langkah yang kongkrit untuk mencegah, menghadapi, mengurangi dampak pandemik penyakit menular.

g) Meningkatkan pemahaman prajurit TNI di lapangan terkait penyakit menular melalui pelatihan-pelatihan singkat setingkat LDD (Latihan Dalam Dinas) sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax.

h) Meningkatkan kemampuan SDM TNI dengan keahlian khusus yang memadai berupa pendidikan dan pelatihan mengatasi pandemi secara perorangan, satuan maupun gabungan untuk menghadapi tantangan di masa depan.

i) Memberikan perlindungan serta jaminan kesehatan bagi para prajurit yang bertugas di garis depan dengan menyiapkan kelengkapan APD dan memberikan kesejahteraan yang memadai, mengingatkan personel TNI yang bertugas di lapangan sangat rentan dan beresiko tinggi tertular virus yang mengakibatkan pandemi.

j) Melaksanakan pengawasan terhadap pelibatan militer dalam membantu pemerintah menertibkan pelaksanaan protokol kesehatan di tengah masyarakat untuk meyakinkan *Civil-Military Cooperation* (CIMIC) terlaksana dengan baik.

o) Melaksanakan *refocussing*, namun tidak hanya *refocussing* anggaran, tapi juga termasuk *refocussing* program latihan, pendidikan, hingga pengadaan alutsista guna mendukung percepatan penanganan pandemi.

2) Upaya dalam mewujudkan Strategi 2.

a) Melengkapi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan TNI dengan ruangan perawatan bertekanan negatif dan *ventilator* agar memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk penanganan pasien yang terdampak pandemi.

- b) Melengkapi Kapal Rumah Sakit milik TNI AL (KRI Semarang - 594 dan KRI dr. Suharso - 990) dengan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih spesifik dan memenuhi standar penanganan pasien yang terdampak pandemi.
- c) Memperkuat alutsista TNI dengan penambahan jumlah kapal rumah sakit, yang dilengkapi dengan fasilitas dan kemampuan dukungan kesehatan setara rumah sakit kelas II.
- d) Menyiapkan Lembaga Farmasi, Biologi dan Vaksin (Lafbiovak) TNI agar mampu memberi dukungan dalam percepatan penanganan pandemi penyakit menular.
- e) Melengkapi Batalyon Kesehatan (Yonkes) yang dimiliki oleh TNI (Yonkes 1 & 2 Kormar TNI AL, Yonkes 1 & 2 Kostrad TNI AD dan Yonkes Denma Mabes TNI AU) dengan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar agar mampu memberi respon cepat dalam penanganan pandemi penyakit menular.
- f) Meningkatkan kerja sama antara TNI dengan berbagai organisasi kesehatan internasional seperti WHO dan AHA Center (ASEAN Coordinating for Humanitarian on Disaster Management Assistance) serta meningkatkan kerja sama antar negara ASEAN dengan negara lain dalam rangka percepatan penanganan pandemi melalui beberapa kegiatan diantaranya: *Workshop, Table Top Exercise (TTX), Seminar, Subject Mater Expert Exchange (SMEE)* dan bertukar pengalaman untuk memperkuat platform kesehatan di masa yang akan datang.
- g) Memberdayakan gedung atau bangunan milik TNI, untuk sementara waktu di alih fungsikan sebagai RS darurat atau tempat Isolasi mandiri.
- h) Memberdayakan KRI sebagai lokasi produksi/pengisian O2 untuk membantu kebutuhan O2 bagi masyarakat dan rumah sakit.

- i) Memberdayakan KRI/ Pesud TNI untuk memobilisasi tenaga kesehatan ke daerah-daerah terpencil yang tidak memungkinkan di tempuh dengan jalur darat.
 - j) melaksanakan penelitian dan kajian (litbang) terkait penyebab dan dampak terjadinya pandemi serta memberikan alternatif solusinya sebagai bagian dari pelaksanaan pertahanan negara terhadap ancaman biologi.
 - k) Peningkatan kemampuan cyber dalam mengatasi opini opini yg merugikan atau meminimalisir dampak berita Hoax
- 3) Upaya dalam mewujudkan Strategi 3.
- a) Menerbitkan regulasi yang merinci mekanisme perbantuan TNI dan koordinasi sipil-militer (CIMIC) dalam penanggulangan pandemi penyakit menular.
 - b) Menerbitkan aturan pelaksanaan yang mengatur lebih spesifik peran TNI dalam penanganan bencana alam/non-alam
 - c) Menyelaraskan implementasi payung hukum melalui kebijakan-kebijakan penanganan pandemi serta melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
 - d) Menyusun rencana kontijensi untuk antisipasi penanganan endemi, epidemi, dan pandemi di masa depan.
 - e) Pembuatan pedoman juklak, juknis khusus pelibatan TNI dalam membantu pemerintah mengatasi Pandemi yang sangat besar kemungkinannya kembali terjadi di masa yang akan datang.
 - f) menyusun *joint plan of action* dan dokumen pendukungnya yang di update / diperbaharui secara berkelanjutan disesuaikan dengan perkembangan pandemi / wabah penyakit serta melaksanakan penilaian sejauh mana dampaknya terhadap keamanan dan pertahanan negara.

BAB IV

PENUTUP

16. Kesimpulan.

Dari bahasan serta analisa pada Bab III dari data dan fakta serta beberapa landasan teori pada Bab II yang telah dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan berupa temuan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kajian pada Bab I terkait dengan bagaimana mengoptimalkan peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi lainnya dimasa mendatang.

a. Indonesia menyatakan Covid-19 adalah bencana nonalam dan sebagai bencana nasional. Beberapa peraturan perundangan Indonesia yang terkait dengan bencana, mengamanatkan kepada TNI untuk membantu pemerintah menghadapi kebencanaan di Indonesia. Lebih khusus, pada Instruksi Presiden RI nomer 4 tahun 2019 tentang Peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia, TNI diinstruksikan untuk mengerahkan personel, sarana, dan prasarana dan upaya menangani kedaruratan kesehatan dan atau bencana non alam, serta memberikan komando penanggulangan taktis. Sejak awal pandemi Covid-19 di Indonesia, telah banyak yang dilakukan oleh TNI, TNI telah mengerahkan sumber daya manusia TNI dan sarana prasarana TNI dalam penanganan pandemi Covid-19 di hampir seluruh wilayah Indonesia melalui gelar operasi penegakan disiplin protokol kesehatan dan pengawasan penerapan PPKM, penanganan pasien Covid-19 serta masih banyak lainnya. Pandemi Covid-19 merupakan kejadian yang tidak diduga sebelumnya, penularannya yang sangat cepat dan meluas serta menimbulkan korban yang tidak sedikit menuntut semua pihak untuk bertindak cepat. Di awal pandemi Covid-19 pelibatan TNI masih bersifat autopilot dimana saat itu belum ada regulasi yang mengatur hingga secara teknis bagaimana pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana pandemi. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan kurang optimalnya peran TNI dalam penanganan pandemi Covid-19, yakni: kurang siapnya SDM TNI, kurang siapnya sarana prasarana TNI ditambah kurang kuatnya regulasi

terkait pelibatan TNI dalam penanganan pandemi Covid-19. Dengan pertimbangan bahwa sifat dasar virus yang akan selalu bermutasi maka patut diantisipasi adanya pandemi berikutnya dari mutasi Covid-19 dengan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan diatas agar peran TNI dapat lebih optimal dalam mendukung pemerintah menangani pandemi lainnya di masa yang akan datang.

b. Peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh TNI sejak awal pandemi Covid-19 secara global. Dalam melakukan perannya sesuai amanat pemerintah, TNI telah mengerahkan SDM, Sarana Prasarana, dan Komando dalam penanggulangan. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan yang disebabkan kurang siapnya SDM TNI, kurang siapnya sarana prasarana TNI dan kurang kuatnya regulasi terkait pelibatan TNI dalam penanggulangan pandemi. Secara garis besar penyebab permasalahan yang ditemukan adalah dikarenakan ketidaksiapan TNI yang disebabkan sangat minimnya waktu untuk melakukan segala persiapan yang diperlukan secara maksimal dikarenakan desakan situasi yang membutuhkan ketanggap segera penanganan. Adapun penyebab permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Luasnya wilayah sebaran transmisi dan terkonfirmasi positif belum tercover seluruhnya secara efektif oleh gelar personil TNI dalam operasi penegakan disiplin protokol kesehatan dan pengawasan penerapan PPKM, hal ini dikarenakan perencanaan operasi yang dilakukan secara cepat karena desakan waktu.

2) Minimnya penyiapan pengetahuan personil TNI untuk melaksanakan tugas mendisiplinkan masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Para personil yang ditugaskan ke lapangan kurang siap dalam menghadapi respon pengabaian masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan perlawanan masyarakat atas pemberlakuan PPKM. Hal ini dikarenakan desakan waktu, para personil TNI hanya mendapat pembekalan singkat tentang tugas mereka dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan, mereka tidak dibekali tentang Ilmu Promosi Kesehatan, bagaimana tentang ilmu kesehatan

masyarakat, bagaimana melakukan komunikasi masa dan komunikasi sosial terhadap masyarakat.

3) Kurangnya jumlah tenaga kesehatan TNI dalam mendukung penanganan pasien Covid-19 dihadapkan situasi tingginya angka terkonfirmasi positif Covid-19 dan minimnya tenaga kesehatan umum. Untuk jangka pendek kondisi ini dapat disiasati dengan pengaturan tenaga kesehatan TNI secara sinergi agar terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan secara keseluruhan dapat diberdayakan secara efisien dan efektif. Untuk jangka panjang memerlukan penambahan tenaga kesehatan TNI mengingat mencetak tenaga kesehatan memerlukan waktu yang lama.

4) Terbatasnya kemampuan sarana prasarana kesehatan TNI dalam penanganan pasien Covid-19. Kondisi terbatasnya kemampuan sarana prasarana TNI ini sama halnya dengan terbatasnya tenaga kesehatan TNI. Menyiasati keterbatasan tersebut diperlukan sinergitas terkait pemanfaatan sarana prasarana kesehatan dengan unsur lain diluar TNI agar pelayanannya dapat efektif dan efisien secara keseluruhan untuk penanganan pasien Covid-19. Hal ini dikarenakan pembangunan sarana prasarana membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

5) Kurangnya regulasi terkait dengan pelibatan TNI dalam perbantuan penanganan pandemi. Peraturan dan ketentuan bagi TNI untuk turut berperan membantu pemerintah dalam menangani bencana sudah ada undang-undangnya, keputusan presiden, hingga instruksi presiden. Secara hirarki peraturan dan ketentuan tersebut untuk level atau tingkat pimpinan, masih perlu turunannya untuk tingkat operasional dan untuk tingkat taktis agar memudahkan pelaksana di tingkat taktis atau lapangan.

17. Rekomendasi.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan agar peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi di masa mendatang dapat lebih optimal adalah sebagai berikut:

a. Mabes TNI, Mabes Angkatan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan perlu bekerjasama dalam rangka meningkatkan kuantitas serta kualitas sumber daya manusia TNI dalam menyiapkan SDM yang unggul di bidang kesehatan, memiliki kemampuan komunikasi masa dan komunikasi sosial yang baik, dan memiliki kemampuan pembinaan teritorial yang mumpuni, dengan cara mengadakan pendidikan latihan baik secara perorangan maupun kelompok, bekerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan baik di luar maupun di dalam negeri untuk meningkatkan keterampilan prajurit di bidang kesehatan maupun keterampilan dalam komunikasi massa dan komunikasi sosial, tujuannya agar dikemudian hari prajurit TNI semakin siap untuk dilibatkan dalam membantu pemerintah mengatasi pandemi. Selain itu juga dengan melakukan rekrutmen tenaga kesehatan yang sebelumnya menjadi relawan kesehatan untuk dilatih menjadi prajurit kesehatan TNI guna mengisi kekosongan DSP di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan TNI mengingat pengalaman yang telah mereka dapatkan saat penanganan wabah pandemi dapat menjadi bekal untuk menghadapi tantangan bencana non alam khususnya pandemi di masa yang akan datang.

b. Mabes TNI perlu bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan untuk melakukan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan TNI serta melaksanakan penambahan alutsista TNI dengan prioritas pengadaan alutsista yang memiliki kemampuan dukungan rumah sakit, baik berupa kapal rumah sakit, water ambulance, helicopter untuk evakuasi medis udara (EMU) hingga pengadaan pesawat udara yang memiliki kemampuan angkut besar, sehingga TNI memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melaksanakan dukungan kesehatan secara optimal, senantiasa siap digerakkan untuk melaksanakan perbantuan kepada pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana termasuk kesiapsiagaan dalam hal penanganan wabah pandemi penyakit menular yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam penanganan.

c. Mabes TNI perlu bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Kemenkumham untuk melaksanakan penguatan dan penyiapan piranti lunak

melalui penyusunan mekanisme kerjasama sipil-militer dalam penanggulangan bencana dan merealisasikan piranti lunak mekanisme peran TNI dalam penanganan bencana non-alam sebagai pedoman yang lebih spesifik untuk mendukung pelibatan TNI dalam membantu pemerintah menangani pandemi penyakit menular. Harapannya kedepan lembaga pertahanan (dalam hal ini TNI dan Kementerian Pertahanan) dapat bekerja secara cepat, tepat dan terukur dalam memaksimalkan peran dan kontribusinya untuk membantu pemerintah dan masyarakat.

Dengan optimalnya peran TNI dalam mendukung pemerintah menangani pandemi akan mempercepat pulihnya kondisi perekonomian nasional yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan pada akhirnya bermuara pada terjaganya ketahanan nasional.

Jakarta, Juli 2022

Penulis

Mochammad Riza, S.E., M.Tr.Opsla, CRMP.
Kolonel Laut (P) NRP 11353/P



DAFTAR PUSTAKA.

1. Buku.

- Kemhan, Buku Putih Pertahanan, 2015.
- Kemhan, Majalah Wira Nomor 2, Edisi Juli-Agustus 2020, hal 28.
- Mabes TNI, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/713/VII/2019 tentang Doktrin Operasi Militer Selain Perang TNI, 2019
- Margus Kuul, "Civil Resistance: An Essential Element of a Total Defense Strategy." Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey-California, 2014.
- Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA, Manajemen SDM, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2001
- Rangkuti, Teknik Membedah Kasus Bisnis, Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI, 2015.
- S. Pamudji, Kerja sama Antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah: Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara, Bina Aksara, 1985.

2. Peraturan perundang-undangan.

- Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.
- Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi dan kimia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.

Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

3. Sumber lain.

Ade Nasihudin Al Ansori, "Penanganan COVID-19, Kemenkes: Kekurangan Banyak tapi Bukan Berarti Tidak Mampu," *Liputan6*, diakses pada 1 Desember 2021, <https://www.liputan6.com/health/read/4348510/penanganan-covid-19-kemenkes-kekurangan-banyak-tapi-bukan-berarti-tidak-mampu>

Andri Saubani, "Jokowi Minta TNI dan Polri Bantu Tangani Pandemi", *Redpublika.co.id*, diakses pada 30 Maret 2022, <https://www.republika.co.id/berita/cokv9k409/jokowi-minta-tni-dan-polri-bantu-tangani-Pandemi>

Asfahan Yahsyi, "Membandingkan Wabah SARS, MERS, dan Virus Corona", *CNN Indonesia*, diakses pada 30 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200312160647-113-482934/membandingkan-wabah-sars-mers-dan-virus-corona>

Christiastuti, "China Kerahkan 450 Staf Medis Militer ke Kota Asal Wabah Virus Corona", *Detiknews*, diakses pada 30 Maret 2022, <https://news.detik.com/internasional/d-4872966/china-kerahkan-450-staf-medis-militer-ke-kota-asal-wabah-virus-corona>

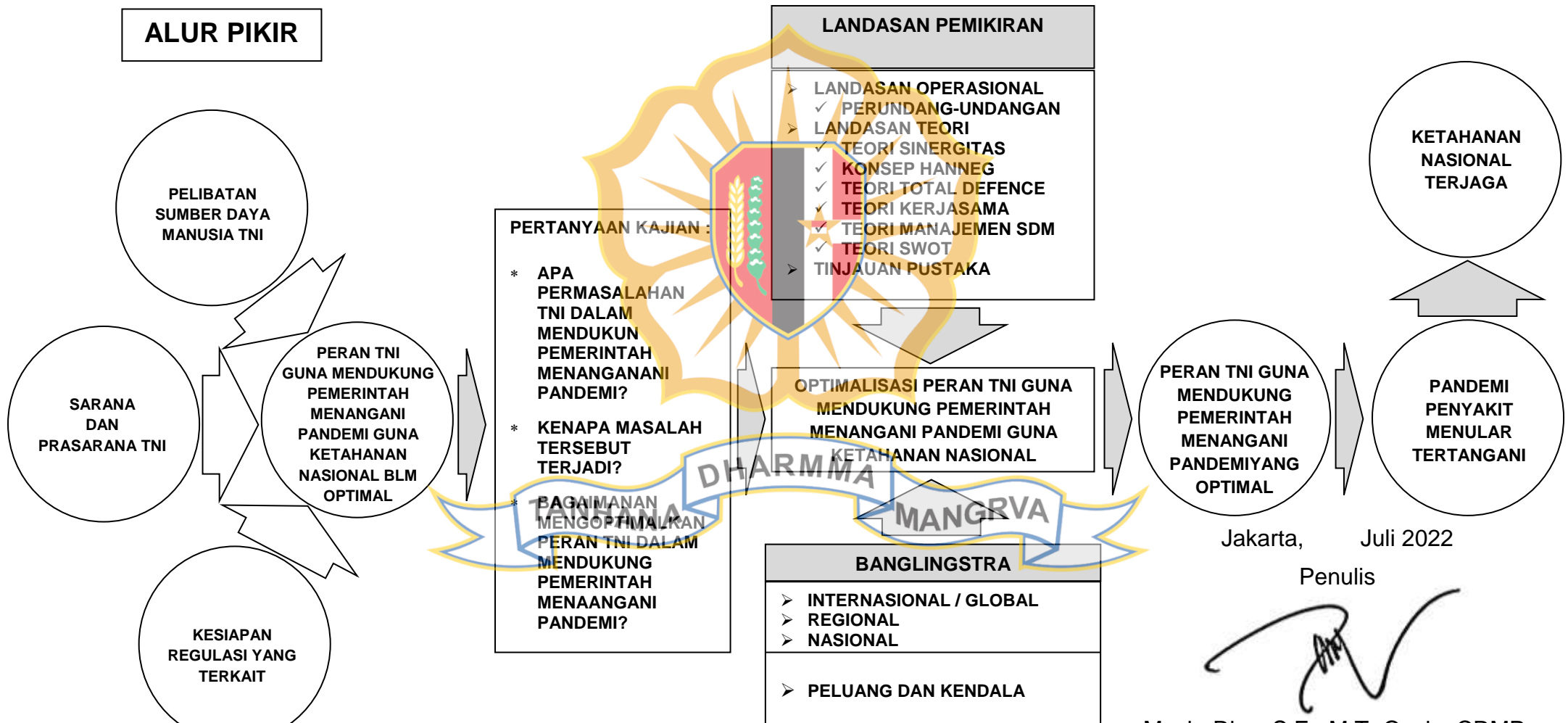
Covid di Indonesia: IGD dan ICU sejumlah rumah sakit penuh, pasien dirawat di tenda - 'Kondisinya darurat mirip perang', diakses 15 April 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57711018>,

Dinkes Kabupaten Agam, "30 Jenis Penyakit Menular, Penyebab dan Pencegahannya", Dinas Kesehatan, diakses pada 30 Maret 2022, <https://dinkes.agamkab.go.id/?agam=informasi&se=detil&id=513>

- Fatimah, "Protokol Kesehatan Adalah Aturan saat Pandemi Covid-19", Tirta.id, diakses pada 26 November 2021, <https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3>
- Gozali Idrus, "ASEAN kerja sama antisipasi gelombang kedua Covid-19", Anadolu Agency, diakses pada 30 Maret 2022, <https://www.aa.com.tr/id/regional/asean-kerja-sama-antisipasi-gelombang-kedua-covid-19-1855787>
- Ihsanudin, "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia", Kompas.com, diakses pada 30 Maret 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>
- Istman Musaharun, "Hadapi Virus Corona, Amerika Andalkan Kapal Militer", Tempo, diakses pada 30 Maret 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1325909/hadapi-virus-corona-amerika-andalkan-kapal-militer>
- Kemendikbud, "Pengertian kata Pandemi", KBBI Daring, diakses pada 30 Maret 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PANDEMI>
- Kemenkes, "Covid-19", Infeksi Emerging, diakses pada 30 Maret 2022, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>
- Lia Agustina, "Belajar Strategi Penanganan Pandemi dari Masa Lalu", BNPB, diakses pada 30 Maret 2022, <https://bnpb.go.id/berita/belajar-strategi-penanganan-pandemi-dari-masa-lalu>
- Mengenal Virus Corona: Sejarah, Jenis, dan Macam Penyakit yang Disebabkannya, diakses 15 April 2022, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/16/133122482/mengenal-virus-corona-sejarah-jenis-dan-macam-penyakit-yang?page=all>
- Mutasi Virus Covid-19 Berbahayakah?, diakses 15 April 2022. <https://www.uui.ac.id/mutasi-virus-covid-19-berbahayakah/>
- Nursastri, "Flu Babi Pernah Jadi Pandemi" Kompas.com, diakses pada 2 maret 2022, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/01/160400923/flu-babi-pernah-jadi-pandemi-ini-6-faktanya?page=all>
- Oxford university press, Si vis pacem, para bellum, diakses pada 30 Januari 2022 <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-1900>

- Permanto, "Optimalisasi Pertahanan Militer Guna Memantapkan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Keutuhan NKRI", Perpustakaan Lemhannas RI, diakses pada 30 Maret 2022, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000010584/swf/4965/files/basic-html/page1.html>
- Rasio Dokter Indonesia Terendah Kedua di Asia Tenggara, diakses 15 April 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/02/rasio-dokter-indonesia-terendah-kedua-di-asia-tenggara>
- Rasio Dokter Tak Imbang, Bappenas Minta Nadiem Perbanyak FK, diakses 15 April 2022 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210917031043-20-695511/rasio-dokter-tak-imbang-bappenas-minta-nadiem-perbanyak>
- Samhis, "Pengertian Ketahanan Nasional", Gurupendidikan.com, diakses pada 30 Maret 2022, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-ketahanan-nasional/>
- Tim Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, "Belajar dari Sejarah Pandemi Flu Spanyol 1918", Berita Terkini, diakses pada 30 Maret 2022, <https://covid19.go.id/p/berita/belajar-dari-sejarah-pandemi-flu-spanyol-1918>
- Ternyata Ini Penyebab Munculnya Varian & Mutasi Baru Covid-19, diakses 15 April 2022., <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220202074532-37-312155/ternyata-ini-penyebab-munculnya-varian-mutasi-baru-covid-19>
- WHO, "Managing Pandemics", World Health Organization, diakses pada 30 Maret 2022, <https://www.who.int/emergencies/diseases/managing-epidemics-interactive.pdf>
- Yunan Helmy, "Minta Puskesmas Lebih Maksimal Tangani COVID-19, Presiden Jokowi Dikritik Masyarakat", Malangtimes, diakses pada 30 Maret 2022, <https://www.malangtimes.com/baca/52943/20200521/112900/minta-puskesmas-lebih-maksimal-tangani-COVID-19%C2%ADpresiden-jokowi-dikritik-masyarakat>
- Yeremia, "Pandemi Covid-19 Turunkan Indeks Ketahanan Nasional", Berita Satu, diakses pada 30 Maret 2022, <https://www.beritasatu.com/nasional/702977/pandemi-covid19-turunkan-indeks-ketahanan-nasional>

OPTIMALISASI PERAN TNI DALAM Mendukung Pemerintah Menangani Pandemi Guna Ketahanan Nasional



Jakarta, Juli 2022

Penulis

Moch. Riza, S.E., M.Tr.Opsla, CRMP.

Kolonel Laut (P) NRP 11353/P

ANALISIS SWOT OPTIMALISASI PERAN TNI DALAM Mendukung Pemerintah Menangani Pandemi Guna Ketahanan Nasional.

a. Penghitungan Bobot IFAS.

KODE	<i>Internal Factors Analysis Summary (IFAS)</i>	Pembobotan							
		1	2	3	4	5			
	Kekuatan (Strengths)	STS	TS	N	S	SS	Jumlah	Total Bobot	Norm Bobot
S1	Komitmen kuat dari TNI untuk membantu pemerintah menangani pandemi.	0	0	1	4	10	15	69	0,072
S2	Jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional	0	0	0	4	11	15	71	0,074
S3	Kekuatan jumlah sumber daya manusia (aparatus) untuk menangani pandemi.	0	0	2	7	6	15	68	0,071
S4	Keterlibatan seluruh komponen bangsa sebagai bagian dari strategi pertahanan semesta baik aparat sipil, TNI-Polri, dan komponen masyarakat	0	0	0	4	11	15	71	0,074
S5	Kekuatan TNI tergelar dari pusat hingga ke daerah di seluruh Indonesia	0	0	1	5	9	15	68	0,071
S6	Fungsi pembinaan teritorial TNI terlaksana dengan baik	0	0	1	6	8	15	67	0,070
S7	Jumlah personel TNI – Polri yang memadai dan struktur yang tergelar sampai tingkat desa dengan sistem komando tunggal dalam	0	2	2	3	8	15	62	0,064

	percepatan penanganan pandemi								
S8	Tersedianya alutsista TNI seperti kapal angkut, kapal tanker, pesawat terbang angkut yang siap digerakkan kapan saja serta adanya unsur-unsur yang sedang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia	0	0	1	6	8	15	67	0,070
KODE	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	STS	TS	S	SS		Jumlah	Total Bobot	Norm Bobot
W1	Undang-undang RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai payung hukum dalam melaksanakan OMSP sampai saat ini masih belum dijabarkan dlm aturan pelaksanaan	0	1	0	11	3	15	61	0,063
W2	Belum adanya peranti lunak yang mendefinisikan peran TNI dalam mekanisme penanganan bencana non-alam	0	3	0	10	2	15	0	0,000
W3	Semakin terbatasnya kapasitas RS dan ruang ICU untuk menangani pasien terdampak pandemi penyakit menular	0	4	0	7	4	15	56	0,058
W4	Belum adanya anggaran khusus dalam percepatan penanganan pandemi penyakit menular, anggaran yang digunakan adalah hasil refocussing dari kegiatan lain	0	2	1	7	5	15	60	0,062
W5	Minimnya pemanfaatan Litbang TNI dalam menganalisa ancaman pandemi	0	1	1	9	4	15	61	0,063
W6	Sumber Daya Manusia TNI yang memiliki kemampuan Nubika (Nuklir, biologi, kimia) terbatas	0	0	0	10	5	15	65	0,068
W7	Sebagian besar alat utama yang dimiliki TNI kondisinya sudah tua, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas	0	3	1	7	4	15	57	0,059
W8	Sarana dan Prasarana kesehatan yang dimiliki TNI belum memadai mengatasi pandemi penyakit menular	0	3	0	7	5	15	59	0,061
								962	1,000

Tabel 8 Penghitungan Bobot IFAS

Sumber: diolah kembali oleh penulis

b. Penghitungan Bobot EFAS.

KODE	External Factors Analysis Summary (EFAS)	Pembobotan					Jumlah	Total Bobot	Norm Bobot
		1	2	3	4	5			
	Peluang (Opportunities)	STS	TS	N	S	SS			
O1	Adanya kesadaran global akan kerja sama multilateral dalam penelitian untuk obat dan vaksin dalam rangka penanganan pandemi	0	0	0	3	12	15	72	0,074
O2	Peran Presiden Republik Indonesia dalam membentuk satuan tugas-satuan tugas yang mampu menyinergikan dan memberdayakan lembaga dan Institusi yang dilibatkan dalam penanganan pandemi	0	0	1	4	10	15	69	0,071
O3	Kekayaan sumber daya alam Indonesia seperti rempah obat atau herbal buatan Indonesia yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.	0	1	0	3	11	15	69	0,071
O4	Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penanganan dan pemulihan ekonomi	0	0	0	4	11	15	71	0,073
O5	Adanya standarisasi penanganan pandemi Covid-19 oleh WHO.	0	0	0	8	7	15	67	0,069
O6	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI sangat tinggi.	0	0	1	2	12	15	71	0,073
O7	Arus globalisasi membawa pengaruh kuat terhadap kemajuan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana	0	0	0	8	7	15	67	0,069
O8	Adanya dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana	0	0	0	6	9	15	69	0,071
KODE	Ancaman (Threats)	STS	TS	S	SS	Jumlah	Total Bobot	Norm Bobot	
T1	Jumlah dokter dan tenaga kesehatan yg terinfeksi penyakit pandemi dan gugur masih terus terjadi.	0	7	0	7	15	47	0,049	
T2	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	1	8	0	6	15	41	0,042	

	dan menurunnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan								
T3	Faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan memberikan kendala tersendiri dalam upaya penanganan pandemi.	0	6	0	6	3	15	51	0,053
T4	Penyebaran berita hoaks yang menyebabkan menurunnya kedisiplinan masyarakat akan protokol kesehatan.	0	2	1	7	5	15	60	0,062
T5	Keacuhan atau ketidakpedulian beberapa orang dalam masyarakat tentang pencegahan pandemi	0	2	0	10	3	15	59	0,061
T6	Kurangnya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam penanganan Pandemi	2	6	0	7	0	15	42	0,043
T7	Kondisi sosial ekonomi beberapa lapisan masyarakat yang turun akibat meningkatnya PHK	0	2	0	12	1	15	57	0,059
T8	Belum adanya peranti lunak yang mendefinisikan mekanisme pelaksanaan kerja sama Sipil-militer yang mengancam pertahanan-keamanan nasional.	0	2	1	12	0	15	55	0,057
								967	1,000

Tabel 9 Penghitungan Bobot EFAS
Sumber: diolah kembali oleh penulis

Keterangan

STS : Sangat Tidak Signifikan

TS : Tidak Signifikan

N : Netral

S : Signifikan

SS : Sangat Signifikan



Dari penghitungan bobot IFAS dan bobot EFAS selanjutnya melaksanakan penentuan *rating* sesuai Tabel 3.6 (Penghitungan Rating IFAS) dan Tabel 3.7 (Penghitungan Rating EFAS)

c. Penghitungan Rating IFAS.

KODE	<i>Internal Factors Analysis Summary (IFAS)</i>	Skor				Jumlah	Total Skor	Norm Skor
		1	2	3	4			
	Kekuatan (Strengths)	Lemah	Sedang	Kuat	Kuat Sekali			
S1	Komitmen kuat dari TNI untuk membantu pemerintah menangani pandemi.	0	0	4	11	15	56	3,733
S2	Jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional	0	0	3	12	15	57	3,800
S3	Kekuatan jumlah sumber daya manusia (aparatus) untuk menangani pandemi.	0	1	8	6	15	50	3,333
S4	Keterlibatan seluruh komponen bangsa sebagai bagian dari strategi pertahanan semesta baik aparat sipil, TNI-Polri, dan komponen masyarakat	0	1	4	10	15	54	3,600
S5	Kekuatan TNI tergelar dari pusat hingga ke daerah di seluruh Indonesia	0	0	7	8	15	53	3,533
S6	Fungsi pembinaan teritorial TNI terlaksana dengan baik	0	1	7	7	15	51	3,400
S7	jumlah personel TNI – Polri yang memadai dan struktur yang tergelar sampai tingkat desa dengan sistem komando tunggal dalam percepatan penanganan Pandemi	0	5	4	6	15	46	3,067
S8	Tersedianya alutsista TNI seperti kapal angkut, kapal tanker, pesawat terbang angkut yang siap digerakkan kapan saja serta adanya unsur-unsur yang sedang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia	1	2	7	5	15	46	3,067
KODE	Kelemahan (Weaknesses)	Lemah	Sedang	Kuat	Kuat Sekali	Jumlah	Total Skor	Norm Skor
W1	Undang-undang RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai payung hukum dalam melaksanakan OMSP sampai saat ini masih belum dijabarkan dalam aturan pelaksanaan	1	5	8	1	15	39	2,600

W2	Belum adanya peranti lunak yang mendefinisikan peran TNI dalam mekanisme penanganan bencana non-alam	1	6	8	0	15	37	2,467
W3	Semakin terbatasnya kapasitas RS dan ruang ICU untuk menangani pasien terdampak pandemi penyakit menular	2	4	8	1	15	38	2,533
W4	Belum adanya anggaran khusus dalam percepatan penanganan pandemi penyakit menular (Covid-19), anggaran yang digunakan adalah hasil refocussing dari kegiatan lain	1	3	7	4	15	44	2,933
W5	Minimnya pemanfaatan Litbang TNI dalam menganalisa ancaman pandemi	2	2	9	2	15	41	2,733
W6	Sumber Daya Manusia TNI yang memiliki kemampuan Nubika (Nuklir, biologi, kimia) terbatas	1	3	7	4	15	44	2,933
W7	Sebagian besar alat utama yang dimiliki TNI kondisinya sudah tua, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas	1	5	4	5	15	43	2,867
W8	Sarana dan Prasarana kesehatan yang dimiliki TNI belum memadai mengatasi pandemi penyakit menular	2	4	6	3	15	40	2,667

Tabel 10 Penghitungan Rating IFAS

Sumber: diolah kembali oleh penulis

d. Penghitungan Rating EFAS.

KODE	External Factors Analysis Summary (EFAS)	Skor				Jumlah	Total Skor	Norm Skor
		1	2	3	4			
	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Lemah	Sedang	Kuat	Kuat Sekali			
O1	Adanya kesadaran global akan kerja sama multilateral dalam	0	0	5	10	15	55	3,667

	penelitian untuk obat dan vaksin dalam rangka penanganan pandemi							
O2	Peran Presiden Republik Indonesia dalam membentuk satuan tugas-satuan tugas yang mampu menyinergikan dan memberdayakan lembaga dan Institusi yang dilibatkan dalam penanganan pandemi	1	1	5	8	15	50	3,333
O3	Kekayaan sumber daya alam Indonesia seperti rempah obat atau herbal buatan Indonesia yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.	1	1	5	8	15	50	3,333
O4	Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi	0	3	8	4	15	46	3,067
O5	Adanya standarisasi penanganan pandemi Covid-19 oleh WHO.	0	2	9	4	15	47	3,133
O6	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI sangat tinggi.	0	1	1	13	15	57	3,800
O7	Arus globalisasi membawa pengaruh kuat terhadap kemajuan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana	0	1	8	6	15	50	3,333
O8	Adanya dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana	0	1	7	7	15	51	3,400
KODE	Ancaman (Threats)	Lemah	Sedang	Kuat	Kuat Sekali	Jumlah	Total Skor	Norm Skor
T1	Jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang terinfeksi penyakit yang mengakibatkan pandemi dan gugur karena terpapar masih terus terjadi.	3	10	2	0	15	29	1,933
T2	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan menurunnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan	3	6	5	1	15	34	2,267
T3	Faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan memberikan kendala tersendiri dalam upaya penanganan pandemi terutama dalam hal sebaran pulau pulau dan daerah terpencil.	2	5	8	0	15	36	2,400
T4	Penyebaran berita hoaks yang menyebabkan menurunnya	2	3	7	3	15	41	2,733

	kedisiplinan masyarakat akan protokol kesehatan.							
T5	Keacuhan atau ketidakpedulian beberapa orang dalam masyarakat tentang pencegahan pandemi	3	1	10	1	15	39	2,600
T6	Kurangnya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam penanganan Pandemi	3	5	5	2	15	36	2,400
T7	Kondisi sosial ekonomi beberapa lapisan masyarakat yang turun akibat meningkatnya PHK	2	2	9	2	15	41	2,733
T8	Belum adanya peranti lunak yang mendefinisikan mekanisme pelaksanaan kerja sama Sipil-militer yang mengancam pertahanan-keamanan nasional.	3	5	7	0	15	34	2,267

Tabel 11 Penghitungan Rating EFAS

Sumber: diolah kembali oleh penulis

Berdasarkan penghitungan bobot dan rating diatas selanjutnya dilaksanakan penentuan kuadran sesuai pada Tabel 3.8 (Penghitungan Bobot dan Rating IFAS) dan Tabel 3.9 (Penghitungan Bobot dan Rating IFAS).

e. Penghitungan Bobot dan *Rating* IFAS.

KODE	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Bobot	Rating	Bobot x Rating

S2	Jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional	0,074	3,800	0,280
S3	Kekuatan jumlah sumber daya manusia (aparatus) untuk menangani pandemi	0,071	3,333	0,236
S4	Keterlibatan seluruh komponen bangsa sebagai bagian dari strategi pertahanan semesta baik aparat sipil, TNI-Polri, dan komponen masyarakat	0,074	3,600	0,266
S5	Kekuatan TNI tergelar dari pusat hingga ke daerah di seluruh Indonesia	0,071	3,533	0,250
S6	Fungsi pembinaan teritorial TNI terlaksana dengan baik	0,070	3,400	0,237
S7	Jumlah personel TNI – Polri yang memadai dan struktur yang tergelar sampai tingkat desa dengan sistem komando tunggal dalam percepatan penanganan penyakit yang menjadi pandemi	0,064	3,067	0,198
S8	Tersedianya alutsista TNI seperti kapal angkut, kapal tanker, pesawat terbang angkut yang siap digerakkan kapan saja serta adanya unsur-unsur yang sedang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia	0,070	3,067	0,214
	Jumlah			1,947
KODE	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Bobot	Rating	Bobot x Rating
W1	Undang-undang RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sebagai payung hukum dalam melaksanakan OMSP sampai saat ini masih belum dijabarkan dalam aturan pelaksanaan	0,063	2,600	0,165
W2	Belum adanya peranti lunak yang mendefinisikan peran TNI dalam mekanisme penanganan bencana non-alam	0,000	2,467	0,000
W3	Semakin terbatasnya kapasitas RS dan ruang ICU untuk menangani pasien terdampak pandemi penyakit menular	0,058	2,533	0,147
W4	Belum adanya anggaran khusus dalam percepatan penanganan pandemi penyakit menular, anggaran yang digunakan adalah hasil refocussing dari kegiatan lain	0,062	2,933	0,183
W5	Minimnya pemanfaatan Litbang TNI dalam menganalisa ancaman pandemi	0,063	2,733	0,173
W6	Sumber Daya Manusia TNI yang memiliki kemampuan Nubika (Nuklir, biologi, kimia) terbatas	0,068	2,933	0,198
W7	Sebagian besar alat utama yang dimiliki TNI kondisinya sudah tua, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas	0,059	2,867	0,170
W8	Sarana dan Prasarana kesehatan yang dimiliki TNI belum memadai mengatasi pandemi	0,061	2,667	0,164

	penyakit menular			
		Jumlah		1,200
			Selisih	0,747

Tabel 12 Penghitungan Bobot dan Rating IFAS

Sumber: diolah kembali oleh penulis

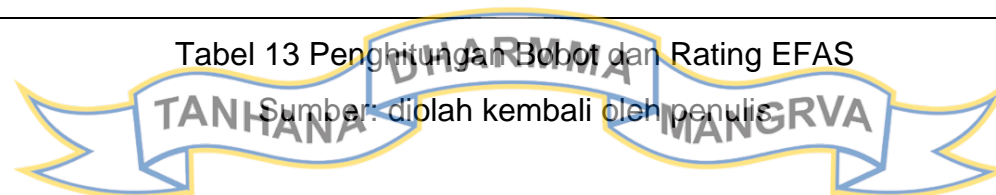
f. Penghitungan Bobot dan Rating EFAS.

KODE	<i>External Factors Analysis Summary (EFAS)</i>	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	<i>Peluang (Opportunities)</i>			
O1	Adanya kesadaran global akan kerja sama multilateral dalam penelitian untuk obat dan vaksin dalam rangka penanganan pandemi	0,074	3,667	0,273
O2	Peran Presiden Republik Indonesia dalam membentuk satuan tugas-satuan tugas yang mampu menyinergikan dan memberdayakan lembaga dan Institusi yang dilibatkan dalam penanganan pandemi	0,071	3,333	0,238
O3	Kekayaan sumber daya alam Indonesia seperti rempah-obat atau herbal buatan Indonesia yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.	0,071	3,333	0,238
O4	Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi	0,073	3,067	0,225
O5	Adanya standarisasi penanganan pandemi Covid-19 oleh WHO.	0,069	3,133	0,217
O6	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI sangat tinggi.	0,073	3,800	0,279
O7	Arus globalisasi membawa pengaruh kuat terhadap kemajuan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana	0,069	3,333	0,231

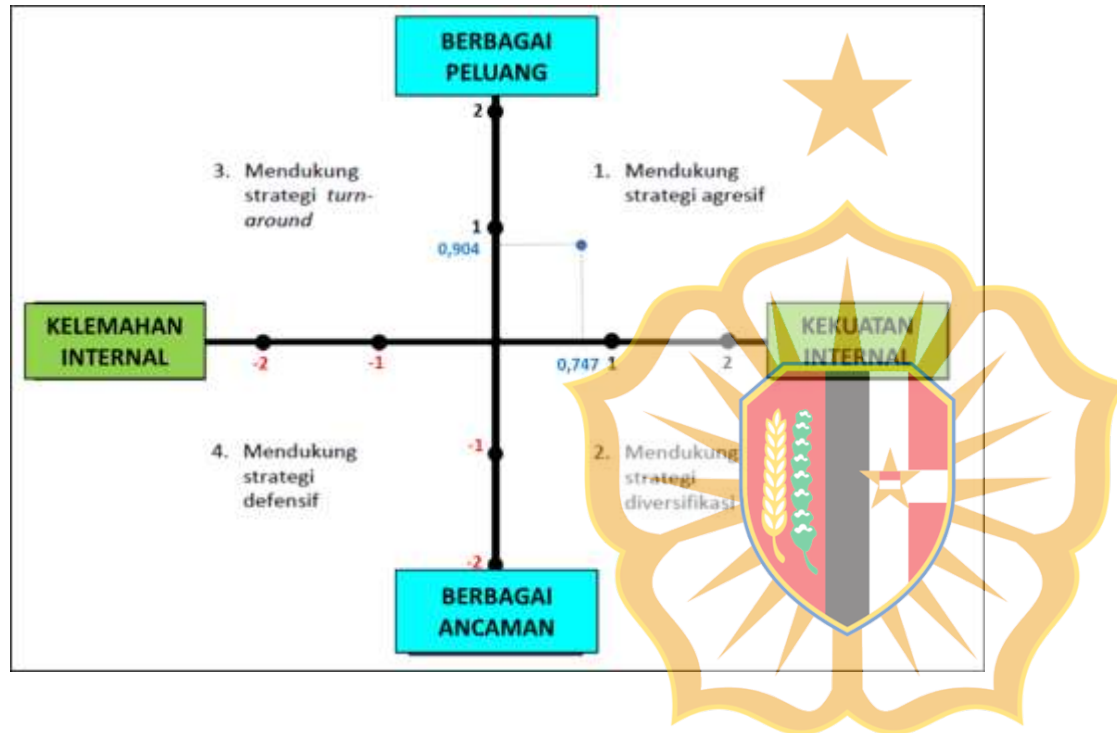
O8	Adanya dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana	0,071	3,400	0,243
	Jumlah			1,944
KODE	Ancaman (<i>Threats</i>)	Bobot	Rating	Bobot x Rating
T1	Jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang terinfeksi penyakit yg bmenjadi pandemi dan gugur masih terus terjadi.	0,049	1,933	0,094
T2	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan menurunnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan	0,042	2,267	0,096
T3	Faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan mpenyakit pandemi terutama dalam hal sebaran pulau pulau dan daerah terpencil.	0,053	2,400	0,127
T4	Penyebaran berita hoaks yang menyebabkan menurunnya kedisiplinan masyarakat akan protokol kesehatan.	0,062	2,733	0,170
T5	Keacuhan atau ketidakpedulian beberapa orang dalam masyarakat tentang pencegahan pandemi	0,061	2,600	0,159
T6	Kurangnya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam penanganan Pandemi	0,043	2,400	0,104
T7	Kondisi sosial ekonomi beberapa lapisan masyarakat yang turun akibat meningkatnya PHK	0,059	2,733	0,161
T8	Belum adanya peranti lunak yang mendefinisikan mekanisme pelaksanaan kerja sama sipil-militer yang mengancam pertahanan-keamanan nasional.	0,057	2,267	0,129
	Jumlah			1,039
			Selisih	0,904

Tabel 13 Penghitungan Bobot dan Rating EFAS

Sumber: diolah kembali oleh penulis



g. Kuadran SWOT Posisi Strategi Optimalisasi Peran TNI Dalam Mendukung Pemerintah Menangani Pandemi.



Jakarta, Juli 2022

Penulis

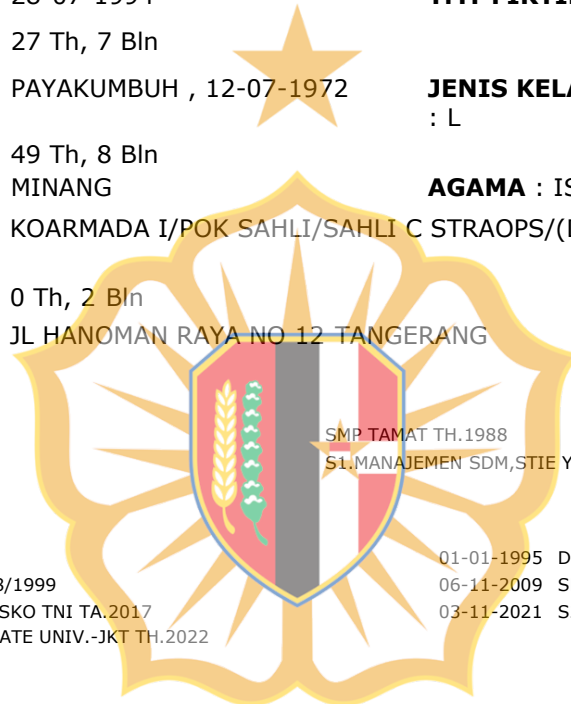


Mochammad Riza, S.E., M.Tr.Opsla, CRMP.

Kolonel Laut (P) NRP 11353/P

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NRP : 11353/P
NAMA : MOCHAMMAD RIZA, S.E., M.Tr.Opsla., CRMP.
PANGKAT : KOLONEL **KORPS** : P
MASA DINAS DLM PANGKAT : 6 Th, 11 Bln
TMT TNI : 28-07-1994 **TMT FIKTIF** : - -
MASA DINAS PRAJURIT : 27 Th, 7 Bln
TEMPAT / TGL LAHIR : PAYAKUMBUH , 12-07-1972 **JENIS KELAMIN** : L
USIA : 49 Th, 8 Bln
SUKU : MINANG **AGAMA** : ISLAM
JABATAN : KOARMADA I/POK SAHLI/SAHLI C STRAOPS/(DIK PPRA LXIII LEMHANNAS RI TA. 2022)
LAMA JABATAN : 0 Th, 2 Bln
ALAMAT : JL HANOMAN RAYA NO 12 TANGERANG



I PENDIDIKAN UMUM

SD TAMAT TH.1985
SMA TAMAT TH.1991

SMP TAMAT TH.1988
S1.MANAJEMEN SDM,STIE YAPAN-SBY TH.2018

II PENDIDIKAN MILITER

28-07-1994 AAL-40 TH.1994
22-06-1999 DIKLAPA-I ANGK-13 TA.1998/1999
14-12-2017 DIKREG SESKO ANGK-44 SESKO TNI TA.2017
18-01-2022 PROFESI CRMP,MKI CORPORATE UNIV.-JKT TH.2022

01-01-1995 DIKPASIS ANGK-7 TH.1995
06-11-2009 SESKOAL ANGK-47 TH.2009
03-11-2021 S2.MAGISTER TERAPAN OPSLA,SESKOAL-JKT TH.2021

III RIWAYAT JABATAN

01-08-1995	ARMATIM/SATKOR/KRI KDA (K.H.DEWANTARA-364)/DIV SAA/KA/ASS	01-04-1996	MABESAL/SPRI KASAL/ADC
01-08-1996	ARMABAR/SATKOR/KRI IBL (IMAM BONJOL-383)/DEP OPS/DIV NAVKOM/KA	15-05-1998	KOARMATIM/SATKOR/KRI SRI (SLAMET RIYADI-352)/DIV SAA/KA
01-05-2000	KOARMATIM/SATROL/KRI HIU (HIU-804)/DEP OPS/KA	01-05-2001	KOARMATIM/LANTAMAL VI/LANAL TERNATE/SOPS/PA
15-02-2004	KOARMATIM/LANTAMAL VI/LANAL TERNATE/DPB DIKLAPA KOUM	01-07-2004	KOARMATIM/SATKAT/KRI SNA (SINGA-651)/PALAKSA
20-02-2006	KOARMATIM/SATROL/KRI TKL (TONGKOL-813)/DAN	24-02-2006	KOARMATIM/SATROL/KRI TKL (TONGKOL-813)
20-07-2006	KOARMATIM/SATROL/KRI HBS (HASAN BASRI-382)/DAN	19-09-2006	KOARMATIM/SATROL/KRI HBS (HASAN BASRI-382)
02-01-2008	KOARMATIM/SATROL/KRI PDG (PANDRONG-801)/DAN	14-11-2008	KOARMATIM/KOLAT/PUSLAT OPSLA/DEP TIK/DIV SBA/KA
02-02-2009	KOARMATIM/MAKOARMA/DENMAKO/DPB DIKSESKOAL	06-11-2009	AAL/DITDIK/SUBDIT LAT/KA
22-11-2010	KOARMATIM/SATKOR/KRI KDA (KH.DEWANTARA-364)/PALAKSA	22-03-2012	KOARMATIM/SATKAT/KRI MDU (MANDAU-621)/DAN
12-11-2013	KOARMATIM/LANTAMAL VIII MDO/LANAL GORONTALO/DAN	23-07-2014	KOARMATIM/SATKOR/KRI AMY (AKHMAD YANI-351)/DAN
27-04-2015	MABESAL/DISADAL/PAMEN (GAS YEKDA PKR BELANDA SBG PAWAS DIKLAT	31-12-2015	MABESAL/DISADAL/PAMEN (SATGAS YEKDA DN KAPAL PKR-10514)/SBG PAWAS DIKLAT

25-04-2017 KOARMATIM/SAHLI PANG/SAHLI PANG C OPS (DIKREG XLIV SESKO TNI 2017)

03-04-2018 KODIKLATAL/PUSLATLEKDALSEN/DAN

01-02-2019 KOARMADA I/SATKOR/DAN

23-03-2020 MABESAL/SOPS KASAL/BAN II OPSLAT/PA

30-12-2021 KOARMADA I/POK SAHLI/SAHLI C STRAOPS/(DIK PPRA LXIII LEMHANNAS RI TA. 2022)

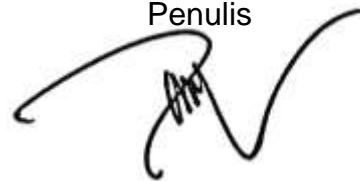
IV TANDA JASA

BT. JALASENA NARARYA
SL. KESETIAAN XVI
SL. DWIDYA SISTHA
SL. WIRA DHARMA (PERBATASAN)

SL. KESETIAAN VIII
SL. KESETIAAN XXIV
SL. KEBAKTIAN SOSIAL
SL. DHARMA NUSA

Jakarta, Juli 2022

Penulis



Mochammad Riza, S.E., M.Tr.Opsla, CRMP.
Kolonel Laut (P) NRP 11353/P





OPTIMALISASI PERAN TNI DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH MENANGANI PANDEMI GUNA KETAHANANNASIONAL

by mohammad riza



Submission date: 20-Jun-2022 06:52AM (UTC-0400)

Submission ID: 1860077006

File name: DUKUNG_PEMERINTAH_MENANGANI_PANDEMI_GUNA_KETAHANAN_NASIONAL.docx (2.02M)

Word count: 14929

Character count: 97330

OPTIMALISASI PERAN TNI DALAM Mendukung Pemerintah Menangani Pandemi Guna Ketahanan Nasional

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.idu.ac.id Internet Source	1%
2	www.kemhan.go.id Internet Source	1%
3	uai.ac.id Internet Source	1%
4	www.jogloabang.com Internet Source	1%
5	Submitted to Defense University Student Paper	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	elibrary-sespim-polri-2022.id Internet Source	< 1%
8	M.hukumonline.com Internet Source	< 1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 15 word

